

**DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP SINGAPURA
DALAM SEKTOR INDUSTRI DI BATAM MELALUI PENGEMBANGAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ALIA ZAHROTIN KAMILA IMANI

20323091

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	13
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.1 Jenis Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	17
1.8.4 Proses Penelitian	17
1.10 Sistematika Pembahasan	17
BAB II KERJA SAMA INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM KEBIJAKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DI BATAM	19
2.1 Hubungan Bilateral Indonesia dan Singapura	19
2.2 Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas	23
2.3 Kerja Sama Indonesia dan Singapura dalam Pengembangan Batam 29	
2.4 Perubahan <i>Free Trade Zone</i> (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	34
BAB III DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP SINGAPURA DALAM SEKTOR INDUSTRI DI BATAM MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)	40
3.1 Kekuatan Ekonomi Relatif	40
3.2 Rezim Internasional	44

3.3	Kepentingan	47
3.4	Institusi dan Pengambilan Keputusan Dalam Negeri.....	52
3.5	Faktor Ideasional.....	58
BAB IV	61
4.1.	Kesimpulan	61
4.2.	Rekomendasi.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 5 Negara Asal Investasi Terbesar ke Indonesia Tahun 2017.....	22
Gambar 2.2 Posisi Geografis Batam	24
Gambar 2.3 Nilai Investasi Singapura di Batam Tahun 2018-2023.....	34
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Batam Tahun 2013-2017	49
Gambar 3.2 BP Batam dalam Seminar Daring dengan Singapura.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Fasilitas FTZ dan KEK.....	37
Tabel 3.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Implementasi dari BP Batam....	54
Tabel 4.1 Hasil Analisis Konsep Diplomasi Ekonomi.....	62

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

18 Juli 2023



Alia Zahrotin Kamila Imani

HALAMAN PENGESAHAN

Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam Sektor Industri di Batam melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

7 Juni 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 **Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.**
- 2 **Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.**
- 3 **Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.**

Tanda Tangan

Hangga Fathana

Hadza Min Fadhli Robby

Gustri Eni Putri

ABSTRAK

Adanya ketimpangan di ASEAN mendorong negara-negara anggota untuk melakukan kerja sama intra-ASEAN. Salah satunya yang dilakukan Indonesia dengan Singapura dalam bidang ekonomi. Indonesia menjadikan Singapura sebagai target diplomasi ekonomi untuk mendorong peningkatan sektor industri di Batam melalui adanya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Penelitian ini membahas terkait pertimbangan dan upaya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura melalui pengembangan KEK. Konsep yang digunakan adalah diplomasi ekonomi baru dari Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura, terdapat lima variabel yang dipertimbangkan, yaitu kekuatan ekonomi relatif dari Singapura, rezim internasional yang berkaitan dengan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan Mou 2006, kepentingan Indonesia dalam meningkatkan sektor industri di Batam, institusi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hubungan dan peran pemerintah Indonesia dan BP Batam, serta faktor ideasional yang berkaitan dengan pandangan dan identitas Indonesia dalam membuat Batam menjadi kompetitif.

Kata kunci: Kawasan Ekonomi Khusus, ASEAN, Batam, Singapura

ABSTRACT

The existence of inequality in ASEAN encourages member countries to carry out intra-ASEAN cooperation. One of them is what Indonesia and Singapore are doing in the economic sector. Indonesia has made Singapore a target for economic diplomacy to encourage the improvement of the industrial sector in Batam through the development of a Special Economic Zone. This research discusses Indonesia's economic diplomacy considerations and efforts towards Singapore through the development of KEK. The concept used is new economic diplomacy from Nicholas Bayne and Stephen Woolcock. This research uses a qualitative approach with literature study. This research found that in Indonesia's economic diplomacy towards Singapore, there were four variables considered, namely international and domestic in responding to Singapore's trade and investment policies, instruments and issues in relation to the ASEAN Free Trade Area (AFTA), state and non-state actors involved relating to the role of the government and BP Batam in economic diplomacy, as well as market impacts related to industrial improvements in Batam.

Keywords: *Special Economic Zone, ASEAN, Batam, Singapura*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara ASEAN berada pada tahap emas pembangunan, meskipun pembangunan regional yang tidak merata masih menjadi tantangan utama yang perlu dihadapi. Ketimpangan keseluruhan di kawasan ini sebagian besar terjadi karena pembangunan yang tidak merata antar negara. Ketimpangan atau kesenjangan pada negara-negara anggota ASEAN dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti *Human Development Index (HDI)*, *Gross Domestic Product (GDP)*, persentase kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi dari masing-masing negara ASEAN. Ketimpangan dalam ASEAN dapat terlihat jelas dengan adanya posisi negara yang berada dalam tahap “perlu dimajukan,” yaitu negara-negara yang dikenal dengan CMLV atau Kamboja, Malaysia, Laos, dan Vietnam (Sibuea 2019).

Salah satu ketimpangan yang paling terlihat jelas adalah dalam bidang ekonomi. Ketimpangan ekonomi di ASEAN secara umum berdampak pada beberapa aspek, salah satunya adalah masih stagnannya nilai perdagangan intra-ASEAN (Muhammad 2023). Meningkatnya ketimpangan dapat mengurangi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan dan juga melemahkan landasan pertumbuhan ekonomi (Kuroda 2013). Secara khusus, ketimpangan dapat berdampak pada aktivitas lintas negara, seperti apa yang ditunjukkan dalam Indonesia dengan Batam, yang merupakan negara berkembang, dan Singapura, yang merupakan negara maju. Hal ini berkaitan dengan

ketergantungan Batam dengan Singapura yang dapat dilihat dari barang impor yang masuk ke Batam kebanyakan berasal dari Singapura dan dominasi ekspor Batam ke Singapura (Widhyharto 2012).

Salah satu cara yang dilakukan ASEAN dalam mengatasi ketimpangan ekonomi yang ada adalah dengan memberikan bantuan yang ditujukan pada negara-negara yang masih tertinggal dalam hal ekonomi. Selain itu, ASEAN turut menjalin kerja sama internal dengan negara-negara ASEAN dalam program pembangunan, seperti apa yang dilakukan dengan Singapura dengan pembentukan program *Singapore Cooperation Program (SCP)* (Rachmawati 2017). Kerja sama intra-ASEAN ini juga tercermin dengan adanya pembentukan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* pada tahun 1992. Kerja sama internal antara negara anggota ASEAN ini pulalah yang menjadi salah satu strategi yang dilakukan tiap negara ASEAN, termasuk Indonesia, dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi yang ada.

Dalam konteks kerja sama dengan negara anggota ASEAN, salah satu negara yang memiliki hubungan dan kerja sama erat dengan Indonesia adalah Singapura. Hubungan antara kedua secara diplomatis telah terjalin secara resmi sejak 7 September 1967. Kedua negara juga berperan sebagai inisiator dalam pembentukan organisasi regional Asia Tenggara, yaitu ASEAN, yang juga merupakan faktor pendorong dalam mewujudkan kerja sama antar keduanya dalam berbagai bidang (Geraldo dan Maarif 2022). Kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Singapura melibatkan berbagai aspek, baik ekonomi, politik, budaya, dan juga pertahanan. Misalnya, dalam bidang pertahanan, kedua negara telah melakukan kerja sama pertahanan yang ditandatangani pada tahun 2007. Dalam bidang ekonomi, Indonesia dan Singapura bekerja sama dalam pengembangan

kawasan perdagangan bebas yang tertera pada *Memorandum of Understanding* (MoU) antara kedua negara pada tahun 2006.

MoU yang ditandatangani oleh Indonesia dan Singapura pada tahun 2006 berkaitan menjadi momentum peningkatan signifikan hubungan ekonomi antara kedua negara. Penandatanganan MoU tersebut diamati langsung oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (Pahlawan dkk. 2014). Nota kesepahaman yang terjalin berkaitan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Penandatanganan nota kesepahaman ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kolaborasi yang lebih dalam dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan Ekonomi Khusus merupakan konsep untuk mengembangkan wilayah ekonomi atau kawasan strategis nasional dengan tujuan utama meningkatkan pembangunan dan perekonomian di suatu daerah, sehingga tercipta kesetaraan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Arjuna 2016). Kawasan Ekonomi Khusus menjadi suatu konsep untuk mengidentifikasi wilayah yang menerapkan kebijakan ekonomi terbuka, termasuk di dalamnya adalah *Free Trade Zone* (FTZ), *Export Processing Zone* (EPZ), pelabuhan, dan berbagai fasilitas lainnya yang dikenal dengan “*zones within zone*.”

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman pada tahun 2006, maka Indonesia dan Singapura secara resmi bekerja sama dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam. Dalam konteks Indonesia, Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan layanan investasi yang memenuhi standar internasional. Kerangka kebijakan

pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia mencakup sejumlah regulasi, seperti pengurangan pajak, penyediaan fasilitas visa, dan penyederhanaan izin kerja untuk tenaga kerja asing. Selain itu, layanan investasi juga disediakan untuk memudahkan investor dalam memperoleh semua izin dan dokumen yang diperlukan melalui layanan terpadu (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2022).

Dalam konteks kerja sama yang dijalin oleh Indonesia dan Singapura, kerja sama antar keduanya dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan (Arjuna, 2016). Indonesia memanfaatkan momentum dan peran Singapura dalam upaya peningkatan sektor yang menjadi pembangunan Batam secara khusus, dan Indonesia secara keseluruhan. Dengan lokasi yang strategis, Batam menjadi kawasan yang ideal sebagai objek dari pembangunan yang ada di Kota Batam. Terlebih, Batam berbatasan langsung dengan Singapura, sehingga akses antara Indonesia dan Singapura terhubung melalui Batam. Hal ini juga berkaitan dengan pandangan pemerintah Singapura yang menganggap Indonesia sebagai lokasi investasi yang menarik bagi para pebisnis Singapura untuk menanamkan modal (Achmad dan Nasir 2022). Di sisi lain, bagi Indonesia, Singapura dianggap sebagai mitra dagang utama, sumber investasi terbesar, serta kontributor terbesar dalam jumlah turis asing yang mengunjungi Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia memanfaatkan ketergantungan yang ada untuk terjadinya peningkatan ekonomi. Kerja sama antara Indonesia dan Singapura tidak hanya akan memberikan manfaat bagi kedua negara tersebut, tetapi juga berpotensi memberikan keuntungan bagi Kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan, di mana kerja sama keduanya dapat menjadi contoh bagi negara anggota ASEAN lainnya (Sarmiento dan Jegho 2023).

Dengan fakta bahwa Singapura menjadi sumber investasi terbesar Indonesia, maka Indonesia memanfaatkan momentum tersebut dengan menjadikan Singapura sebagai negara tujuan dalam diplomasi ekonominya melalui adanya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Pelaksanaan diplomasi ekonomi juga terus digalakkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi internasional yang semakin penuh dengan tantangan (Pramudyani 2020). Oleh karenanya, diplomasi ekonomi ini diperlukan dalam rangka mendorong terjadinya peningkatan perdagangan dan investasi yang akan berdampak pada kepentingan perekonomian Indonesia.

Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia memiliki fokus pada beberapa sektor, di antaranya industri, pengolahan ekspor, pariwisata, energi, dan juga kesehatan. Fokus pada sektor industri dalam penelitian ini berkaitan dengan perekonomian di Batam yang didominasi oleh sektor industri (Apriliyanti 2015). Secara umum, Kawasan Ekonomi Khusus lainnya juga dipenuhi oleh adanya sektor industri. Sehingga, diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia terhadap Singapura dilakukan guna meningkatkan sektor industri di Batam melalui adanya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Dalam meningkatkan sektor industri melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Indonesia memerlukan strategi dan upaya yang dilakukan dalam kerangka diplomasi ekonominya terhadap Singapura pada periode 2018-2023. Rentang waktu awal berkaitan dengan inisiasi serius dalam perencanaan KEK Batam. Di sisi lainnya, rentang batas waktu pada 2023 memungkinkan untuk melihat secara komprehensif dinamika pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia

terhadap Singapura, yang juga mempertimbangkan konsekuensi dari adanya pandemi global Covid-19.

Topik diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam pengembangan KEK di Batam menjadi menarik karena tidak hanya untuk menggali dinamika hubungan ekonomi antar negara tetangga, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana strategi diplomasi ekonomi dapat memengaruhi perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Di samping itu, penelitian ini memiliki relevansi praktis dalam konteks kebijakan ekonomi dan pengembangan regional ASEAN. Oleh karenanya, penelitian ini mencoba untuk mengeksplor lebih dalam terkait diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam peningkatan sektor industri melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: “*Bagaimana upaya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam sektor industri di Batam melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola dan upaya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

2. Untuk mengetahui peningkatan sektor industri dari diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan-batasan pembahasan untuk memastikan cakupan pembahasan tidak terlalu meluas. Penelitian ini didasari oleh isu ketimpangan ekonomi yang ada di ASEAN. Dalam melakukan penelitian penulis hanya berfokus kepada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia, tepatnya di Batam, yang secara spesifik hadir setelah kebijakan *Free Trade Zone*. Hal ini didasarkan oleh adanya penurunan pertumbuhan ekonomi Batam yang kemudian lahirlah inisiasi untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam.

Dalam penelitian, rentang waktu yang menjadi cakupan adalah sejak awal mula pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Rentang waktu tersebut dipilih dengan beberapa pertimbangan yang jelas. Pertama, tahun 2018 menjadi awal dari inisiasi pengembangan dan transformasi KEK di Batam, sehingga memungkinkan penulis untuk mendalami detail proses perencanaan, implementasi, serta dampak awal dari kebijakan tersebut. Kedua, batas waktu hingga tahun 2023 memungkinkan untuk melihat secara komprehensif dinamika pengembangan KEK dan secara khusus upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Singapura melalui pengembangan KEK Batam. Ketiga, rentang batas hingga 2023 juga memperhitungkan dampak dari Pandemi Covid-19 yang dapat memiliki konsekuensi signifikan terhadap upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang membahas tentang kebijakan kawasan bebas Batam serta kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura dari penelitian sebelumnya, tetapi penulis tidak menemukan kesamaan persis terhadap judul yang diteliti sebelumnya. Namun penulis merujuk pada beberapa jurnal dan penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang serupa sebagai referensi dan bahan studi dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Desy Arjuna yang berjudul “Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam Realisasi *Special Economic Zone* (SEZ) di Batam, Bintan dan Karimun,” di mana pada penelitiannya ia membahas mengenai realisasi kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura tepatnya pada kawasan ekonomi di pulau Batam, Bintan, Karimun. Pada penelitiannya dijelaskan tentang Kota Batam yang dijadikan sebagai tempat daerah tujuan investasi. Hal tersebut dapat ditandai dengan dilakukannya penanaman modal asing serta penanaman modal dalam negeri oleh pemerintah. Persamaan penelitian Arjuna dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Singapura. Tetapi penelitian Arjuna sendiri lebih berfokus terhadap realisasi dari SEZ atau Kawasan Ekonomi Khusus yang dilakukan di Batam, Bintan, dan Karimun, sedangkan penelitian ini fokusnya terletak pada kebijakan KEK di satu wilayah saja, yaitu Batam. Sehingga yang menjadi perbedaan dari penelitian Arjuna dan penelitian ini adalah mengenai fokus dari kerjasama Indonesia dan Singapura. Penelitian ini telah memaparkan cukup

jelas mengenai realisasi dari kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura pada kawasan ekonomi khusus. Realisasi yang dipaparkan dalam penelitian tersebut berupa penandatanganan *framework agreement* untuk membuka kerjasama ekonomi di berbagai sektor seperti investasi, dan perdagangan bebas serta pembentukan *freeport zone*. Kemudian guna untuk mempromosikan ketiga wilayah ekonomi khusus tersebut, mereka membentuk *Joint Investment Promotion* yang bergerak dalam bidang perdagangan. Selanjutnya untuk meningkatkan daya saing *caregiver* dan perawat asal Indonesia mereka mengadakan *Tripartit Workshop on Manpower Management*.

Tidak hanya itu, penelitian selanjutnya adalah penelitian yang berjudul “Dinamika Hubungan Bilateral Investasi Indonesia Singapura: Kasus Free Trade Zone di Batam 2005-2009” yang dilakukan oleh Hilda Delvia Febriyanti Pakpahan. Dalam penelitian tersebut terdapat pemaparan mengenai hubungan kerjasama antara Indonesia dan Singapura yang mengalami peningkatan dari aspek investasi dipicu oleh wilayah Batam sebagai lokasi yang strategis. Konsep yang digunakan pada penelitian ini antara lain: konsep hubungan bilateral, kerjasama internasional, perdagangan internasional, kepentingan nasional, investasi nasional serta *Free Trade Zone*. Dinamika ekonomi yang dijelaskan oleh penulis yaitu berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan menawarkan beberapa sumber daya yang dimiliki serta penanaman modal untuk investasi asing khususnya di Pulau Batam. Sedangkan kepentingan yang ingin dicapai oleh Singapura adalah mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki dengan terpenuhinya kebutuhan sarana lain demi melancarkan kegiatan ekonominya. Persamaan penelitian Febriyanti (2011) dengan

penelitian ini adalah pembahasan mengenai kawasan bebas Batam. Tetapi penelitian Febriyanti sendiri lebih berfokus terhadap pembahasan mengenai dinamika hubungan yang terjadi antara Indonesia dan Singapura dengan adanya kebijakan *free trade zone* di Batam yang berkaitan dengan kepentingan kedua negara. Selain itu, penelitian Febriyanti memiliki batasan khusus pada tahun 2005-2009. Sehingga penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan membahas mengenai diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam kaitannya dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam.

Selain penelitian daripada itu, terdapat penelitian ketiga yang berkaitan dengan Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Singapura tetapi dibahas dari aspek digitalisasi. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Muhammad Bagus Harpiandi dengan judul penelitian “Kerjasama Indonesia-Singapura Dalam Bidang Ekonomi Digital 2017”. Fokus penelitiannya terletak pada hubungan kerja sama antara kedua negara tersebut melalui kondisi ekonomi digital serta membahas terkait dampak dari ekonomi digital bangsa Indonesia. Dalam menyusun penelitiannya, Harpiandi menggunakan teori mengenai ekonomi digital, kepentingan nasional, globalisasi, hubungan internasional, serta teori kerjasama bilateral. Serta menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis deskriptif yang ditunjang oleh beberapa data serta kajian literatur untuk mendukung penelitiannya. Peneliti menggunakan teori ilmiah yang berkaitan dengan hubungan internasional untuk digunakan sebagai konseptualisasi dari suatu gagasan menjadi penelitian skripsi. Kemudian, penulis menggunakan teori globalisasi dan ekonomi digital untuk melakukan analisis berupa proses terbentuknya digitalisasi ekonomi. Dari hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi digital di Indonesia masih tergolong cukup

baik dilihat dari prospek serta potensi yang dimiliki. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ditemukan kendala mengenai regulasi serta permodalan terhadap pelaku *e-commerce*. Sehingga kerjasama yang dilakukan antar kedua negara tersebut dalam aspek digitalisasi akan menguatkan sektor ekonomi digital yang nantinya berdampak positif terhadap kerjasama yang berkembang dan berkelanjutan (Harpiandi 2019). Pembahasan mengenai kerjasama bilateral Indonesia dan Singapura menjadi persamaan penelitian Harpiandi dengan penelitian ini, dimana pembahasan tersebut dapat menjadi acuan untuk mengetahui pola kerjasama yang dilakukan antar kedua negara. Tetapi Harpiandi (2017) lebih berfokus terhadap kerjasama dalam bidang ekonomi digital. Sehingga hal tersebut menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yang membahas mengenai diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam kaitannya dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam.

Terakhir, terdapat penelitian Achmad dan Fadillah Afrivo Nasir pada tahun 2022 yang berjudul “Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam Pengelolaan Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Era Joko Widodo-Jusuf Kalla (Periode 2015-2019).” Achmad dan Nasir menggunakan konsep kerjasama internasional dan perdagangan bebas untuk membahas mengenai kerjasama pemerintah Indonesia dan Singapura terkait wilayah Kawasan Ekonomi Khusus. Penelitian Achmad dan Nasir (2022) menemukan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan perpanjangan kepentingan antara kedua negara. Kerjasama antara Indonesia dan Singapura dilakukan di Batam, Bintani, dan Karimun, dan dioptimalkan dengan pemberlakuan pembebasan pajak untuk memudahkan pelayanan penanaman modal. Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus

juga masih dalam kerangka perdagangan bebas. Persamaan penelitian Achmad dan Nasir (2022) dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah bahasan mengenai kerjasama bilateral pemerintah Indonesia dan Singapura. Tetapi penelitian Achmad dan Nasir lebih berfokus terhadap pengelolaan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap diplomasi Indonesia terhadap Singapura melalui pengembangan KEK Batam. Sehingga perbedaan dari penelitian Achmad dan Nasir dengan penelitian ini terletak pada variabel yang dibahas, dimana penelitian ini akan menganalisis mengenai diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam meningkatkan sektor industri di Batam melalui pengembangan KEK.

Secara keseluruhan, dari hasil tinjauan yang telah dilakukan atas penelitian-penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian ini. Kebanyakan penelitian yang telah dilakukan memiliki fokus yang berbeda atau cakupan tahun yang khusus. Selain itu, penelitian yang ada juga belum ada yang membahas mengenai analisis diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam meningkatkan sektor industri di Batam melalui pengembangan KEK. Sehingga hal itulah yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini, dimana penulis akan membahas mengenai analisis diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam meningkatkan sektor industri di Batam melalui pengembangan KEK.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi yang dikemukakan oleh Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock dalam bukunya yang berjudul “*The New Economic Diplomacy*.” Bayne dan Woolcock membagi diplomasi ekonomi melalui beberapa variabel yang meliputi *relative economic power*, *international regimes*, *interests*, *institutions and domestic decision-making*, dan *ideational factors* (Bayne dan Woolcock 2017). Kelima variabel tersebut merupakan variabel yang mempengaruhi negosiasi dalam diplomasi ekonomi.

Variabel pertama, yaitu *relative economic power* atau kekuatan ekonomi relatif, merujuk pada ukuran perekonomian negara yang terlibat dalam negosiasi. Variabel kekuatan ekonomi relatif ini sendiri berangkat dari pemikiran realis yang menyatakan bahwa kekuatan ekonomi relatif dan keuntungan relatif memengaruhi negosiator. Dalam konteks tersebut, semakin besar perekonomian suatu negara, maka kekuatan pasar yang dimiliki juga lebih besar karena adanya daya tarik penawaran akses terhadap pasar tersebut (Bayne dan Woolcock 2017).

Variabel kedua, yaitu *international regimes* atau rezim internasional. Rezim sendiri meliputi aturan formal dan informal, norma, serta prosedur pengambilan keputusan. Variabel ini menjelaskan bahwa rezim berfungsi dalam memfasilitasi kerjasama dengan mengurangi biaya transaksi, sehingga memungkinkan negosiasi yang berulang di mana kesepakatan selanjutnya dapat dibangun berdasarkan kerjasama sebelumnya. Konsep rezim juga melibatkan jenis-jenis kerjasama yang tidak terlalu resmi, seperti kolaborasi dalam rezim swasta atau multi-pihak. Variabel ini menjadi semakin vital dalam diplomasi ekonomi, karena rezim membantu mengelola pasar saat negara tidak mampu atau enggan melakukannya sendiri.

Variabel ketiga, yaitu *interests* atau kepentingan. Dalam variabel ini, analisis rasional sesuai untuk mempelajari kepentingan-kepentingan yang ada karena pendekatannya yang sistematis dan logis. Analisis rasional mengasumsikan bahwa negara atau pihak-pihak dalam negosiasi mencari keseimbangan antara preferensi kepentingan yang beragam untuk memaksimalkan utilitas. Utilitas yang dimaksud dapat dalam bentuk kesejahteraan ekonomi, ataupun bersangkutan dengan perolehan dan pertahanan kekuatan pemerintah atau partai politik.

Variabel keempat, yaitu *institutions and domestic decision-making* atau institusi dan pengambilan keputusan dalam negeri. Variabel ini menjelaskan bahwa institusi berperan dalam menetapkan keseimbangan kepentingan dan cara-cara yang digunakan, serta melaksanakan prosedur pengawasan negosiasi. Dalam konteks diplomasi ekonomi, pelaku utamanya adalah lembaga legislatif atau entitas lain yang memiliki kekuatan untuk memveto kesepakatan yang telah dipersiapkan.

Variabel kelima, yaitu *ideational factors* atau faktor ide. Ide memiliki potensi untuk membentuk hasil yang beragam tergantung pada perspektif yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. Pandangan dunia dari pihak-pihak yang terlibat dalam diplomasi ekonomi akan memengaruhi cara mereka dalam menilai situasi. Asumsi ini sesuai dengan pandangan konstruktivis, yang juga berasumsi bahwa terdapat peran persuasi dalam proses tawar-menawar. Dalam pendekatan konstruktivis dalam negosiasi, upaya akan dilakukan untuk mencapai konsensus yang memuaskan berdasarkan pada pengetahuan atau pemahaman bersama yang dibangun bersama-sama. Oleh karena itu, dalam praktiknya, diplomasi ekonomi cenderung mencakup persuasi dan tawar-menawar.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa diplomasi ekonomi dilakukan guna tercapainya penyelesaian isu atau masalah agar mendapatkan kepentingan ekonominya. Dalam relevansinya dengan penelitian ini, Indonesia sebagai pelaku diplomasi ekonomi berkeinginan untuk meningkatkan sektor industri di Batam melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Di saat yang bersamaan, Singapura menjadi target dari diplomasi ekonomi ini karena Singapura merupakan negara yang berpengaruh terhadap Indonesia, khususnya Batam, yang dibuktikan dengan posisinya sebagai investor terbesar di Batam. Oleh karenanya, tujuan dari diplomasi ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan sektor industri di Batam.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan penelitian dengan menggunakan kerangka konseptual diplomasi ekonomi dari Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock, yang dapat dikemukakan adalah Indonesia menggunakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai alat untuk melakukan diplomasi ekonomi terhadap Singapura. Secara lebih terstruktur, pengaplikasian konsep diplomasi ekonomi dari Bayne dan Woolcock adalah sebagai berikut:

- a. Kekuatan ekonomi relatif: Iklim dan kebijakan investasi dan perdagangan yang dimiliki Singapura menjadi faktor pertimbangan Indonesia dalam menjadikan Singapura sebagai target diplomasi.
- b. Rezim internasional: Diplomasi Indonesia dengan Singapura dilandaskan oleh *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan MoU pengembangan KEK pada tahun 2006.

- c. Kepentingan: Diplomasi ekonomi dilakukan untuk meningkatkan sektor industri di Batam yang sempat mengalami penurunan.
- d. Institusi dan pengambilan keputusan dalam negeri: Hubungan prinsipal-agen dari pemerintah pusat sebagai pengambil keputusan dan BP Batam sebagai pelaksana.
- e. Faktor ideasional: Diplomasi ekonomi untuk meningkatkan sektor industri di Batam guna memperlihatkan identitas dan kebanggaan Indonesia untuk membuat Batam lebih kompetitif.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif karena data yang tersedia terutama dalam bentuk literatur. Metode penelitian kualitatif dikenal dengan deskripsi analitik, menekankan proses daripada hasil, dan bersifat induktif. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif akan menjadi kerangka dasar untuk menjelaskan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura sebagai subjek yang akan diteliti. Dengan objek penelitian berupa peningkatan sektor industri di Batam melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka. Penulis menggunakan data sekunder seperti jurnal, buku, situs resmi, artikel berita, dan laporan resmi dari organisasi dan pemerintah. Data juga diperoleh dari berita terbaru yang relevan dengan topik yang dibahas oleh penulis.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dari penelitian ini berupa mengumpulkan data. Data-data yang dikumpulkan dikaji terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan menganalisis, dan mengaitkan setiap subjek dan objek yang berkaitan dalam kasus yang diteliti oleh penulis. Semua data yang digunakan dan ditulis dalam penelitian juga akan diteliti lebih dalam untuk dipastikan kredibilitas dan validitas data tersebut.

1.10 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengikuti seluruh uraian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Bagian awal tulisan ini mencakup penjelasan mengenai pemilihan judul, konteks masalah, fokus permasalahan, kerangka teoritis yang digunakan, hipotesis yang diajukan, cakupan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan keseluruhan.

BAB II : Bagian ini memuat pemaparan terkait latar belakang dari kerjasama Indonesia dan Singapura, Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, dan perubahan *Free Trade Zone* ke Kawasan Ekonomi Khusus di Batam.

BAB III : Membahas tentang diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam sektor industri di Batam melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dengan menggunakan lima variabel utama sesuai dengan konsep diplomasi ekonomi baru Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock.

BAB IV : Merupakan kesimpulan akhir dari tema yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

KERJA SAMA INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM KEBIJAKAN

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DI BATAM

2.1 Hubungan Bilateral Indonesia dan Singapura

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura dapat ditelusuri secara resmi pada tahun 1967, bertepatan dengan berakhirnya konfrontasi di Indonesia dengan latar belakang gagalnya kudeta pada tanggal 30 September 1967 yang menyebabkan pergantian Presiden Soekarno dengan Jenderal Soeharto (Marzuki 2017). Ketegangan antara keduanya ini bukanlah hal yang baru, melainkan telah terjadi pada tahun-tahun sebelum akhirnya kedua negara meresmikan hubungan diplomatiknya. Sebelumnya, ketidakpuasan Indonesia terhadap Singapura didasarkan oleh kebenciannya terhadap kontrol Singapura atas arus perdagangan masuk dan keluar Indonesia. Persepsi negatif yang dimiliki oleh Indonesia semakin diperburuk oleh adanya penyaluran bantuan ekonomi dan militer asing kepada pemberontak yang terlibat dalam PRRI/Permesta melalui Singapura, serta tingginya angka penyelundupan dan kelambanan Singapura dalam mencegah aktivitas ilegal yang terjadi.

Namun, hubungan bilateral Indonesia dan Singapura sejak tahun 1970-an, setelah sebelumnya telah diresmikan pada 7 September 1967, sangat kontras dengan tahun-tahun awal yang penuh dengan gejolak dan ketegangan (Marzuki 2017). Sejak itu, tema persahabatan dan kerja sama yang erat mendominasi gambaran hubungan bilateral antara kedua negara. Ketidakpuasan dan persepsi negatif Indonesia terhadap Singapura sebelumnya tampaknya telah mereda. Hal ini

ditunjukkan dengan keeratan hubungan kedua negara pada masa pemerintahan Indonesia dibawah Soeharto dan Singapura dibawah Lee Kuan Yew. Salah satu bukti dari keeratan hubungan keduanya adalah dibentuknya kesepakatan penetapan garis batas laut antara kedua negara di Selat Singapura pada 25 Mei 1973 (Wanandi 2017).

Singapura, sebagai salah satu negara sahabat yang berdekatan secara geografis dengan Indonesia, memegang peran yang signifikan dalam kepentingan nasional Indonesia serta dinamika kawasan ASEAN secara menyeluruh. Kedekatan geografis antara kedua negara telah mendorong terbentuknya hubungan erat serta kerja sama lintas sektor. Namun, posisi geografis tersebut juga membawa sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi kepentingan nasional Indonesia (Akmaludin 2016).

Hubungan antara Indonesia dan Singapura telah perkembangan yang cukup mencolok dalam berbagai aspek kerja sama, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, serta sosial budaya. Hubungan dan kerja sama politik antara kedua tercermin melalui tiga perundingan perjanjian, yakni perjanjian pertahanan, ekstradisi, dan kontra-terorisme. Kemajuan yang mencolok dalam hubungan bilateral Indonesia dan Singapura tercermin melalui penyelesaian perjanjian ekstradisi serta kerja sama dalam bidang pertahanan (I. S. Putra dan Karlina 2022).

Dalam bidang ekonomi, hubungan Indonesia dan Singapura dapat ditelusuri dari kerja sama yang dilakukan kedua negara pada tahun 1980 terkait dengan pengembangan area Batam (BP Batam 2021a). Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Goh Chok Tong dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Sudjatmiko. Kerja sama ini

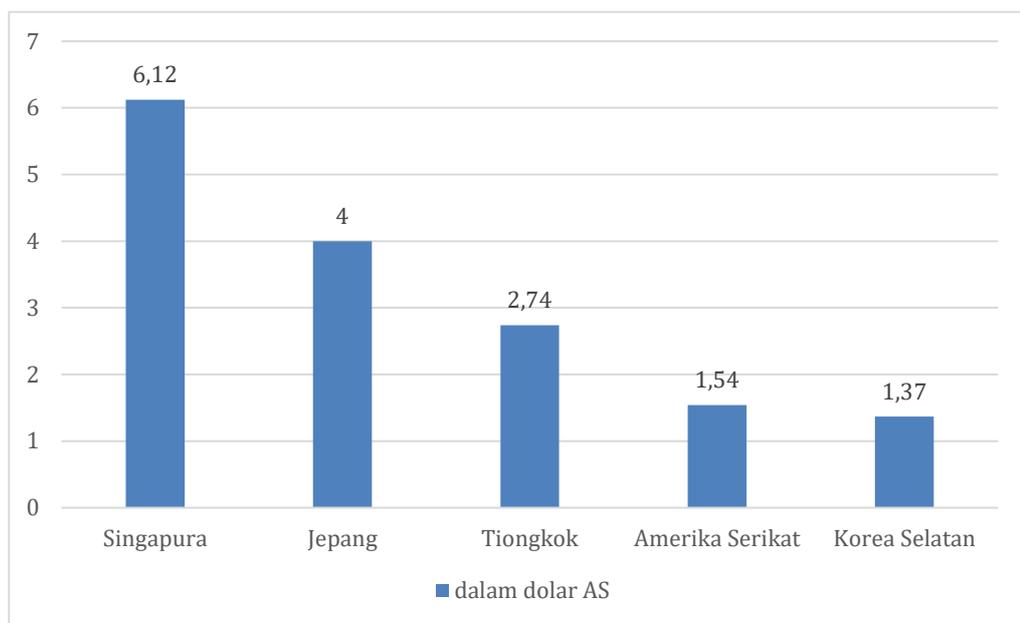
sendiri tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1980. Persetujuan terkait kerja sama ekonomi di pulau Batam, Bintan, dan Karimun kemudian kembali terealisasi pada 25 Juni 2006 (Vingalianti 2019).

Secara kontinuitas, pemerintah Indonesia dan Singapura melakukan kerja sama ekonomi bilateral antara kedua negara. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura membentuk kerja sama sebagai bentuk dari komitmen untuk mempererat hubungan keduanya sekaligus menunjukkan eksistensi keduanya di kawasan ASEAN ataupun internasional. Diplomasi dan hubungan erat kedua negara erat kaitannya dengan pembangunan nasional, khususnya Indonesia yang masih membutuhkan investor (Putri et al., 2023). Di samping itu, kedua negara semakin terikat erat oleh saling ketergantungan, yang melibatkan keunggulan terintegrasi Singapura dan sumber daya alam yang kaya di Indonesia. Hal ini menjadikan ketergantungan tersebut saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Singapura adalah salah satu mitra kunci dari Indonesia dalam bidang investasi. Pada tahun 2016, misalnya, di tengah ekonomi global yang lesu, Singapura menunjukkan peningkatan investasinya di Indonesia dengan peningkatan sebesar \$7,1 milyar dari bulan Januari sampai September 2016 (Bareksa 2016). Pada tahun yang sama pula kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama antara keduanya dalam bidang ekonomi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 2016c). Dalam pertemuan kedua negara, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong turut berkomitmen peningkatan kerja sama dalam berbagai bidang lainnya, di antaranya investasi di kawasan Batam, Bintan, Karimun, bidang pariwisata, energi, dan pembentukan asosiasi bisnis antara kedua negara.

Sejak tahun 2014, Singapura menjadi investor asing terbesar di Indonesia. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, pada tahun 2017, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa investasi dari Singapura yang masuk ke Indonesia mencapai angka \$6,12 milyar (Databoks 2017). Dalam laporannya tersebut, BKPM turut menyatakan bahwa Singapura masih terus menjadi investor asing terbesar di Indonesia.

Gambar 2.1 5 Negara Asal Investasi Terbesar ke Indonesia Tahun 2017



Sumber: Statista, 2018

Selain investasi, Singapura juga merupakan mitra dagang utama Indonesia, meskipun terdapat tren penurunan perdagangan bilateral sejak tahun 2012, di mana salah satunya disebabkan oleh adanya perlambatan ekonomi global. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dan Singapura pada tahun 2012 mencapai angka \$43,22 milyar. Pada 2022, angka perdagangan bilateral antara kedua negara \$33,8 milyar (Kementerian Luar Negeri RI 2023).

2.2 Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas

Batam merupakan salah satu dari fokus kajian kawasan perdagangan bebas di Indonesia. Pengimplementasian *Free Trade Zone* (FTZ) sebelumnya di Batam sendiri tidak lepas kaitannya dari keistimewaan yang selama ini dimiliki Batam. Batam sebelumnya telah ditetapkan sebagai kawasan berikat atau *bonded zone*, di mana kawasan berikat ini sendiri merupakan wilayah tertentu di dalam pabean Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu dan menerapkan peraturan khusus dalam kaitannya dengan pabean (Zaenuddin dkk. 2017). Perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan berikat ini diwajibkan untuk mengekspor setidaknya dua pertiga dari produksi mereka. Keuntungan dari kawasan berikat ini ialah izin bagi warga negara asing untuk memiliki 100% bisnis mereka dan pembebasan bea masuk untuk suku cadang dan bahan untuk keperluan produksi. Penetapan Batam sebelumnya sebagai kawasan berikat merupakan pengembangan dari status Batam sebelumnya sebagai kawasan pergudangan atau *bonded warehouse* (Rejeki 2014). Selain itu, penetapan Batam sebagai kawasan berikat sendiri turut serta dengan perluasan jangkauan wilayah yang meliputi Pulau Rempang dan Galang.

Batam sendiri terletak dalam wilayah Kepulauan Riau yang sebelumnya merupakan bagian dari administrasi Provinsi Riau, yang kini menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Akses ke Batam dapat dilakukan melalui berbagai jenis transportasi. Bandara Hang Nadim yang terletak di Batam menjadi salah satu bandara internasional Indonesia yang memiliki landasan pacu untuk pesawat penumpang besar (Fauziah dan Aritonang 2023). Batam juga dapat dijangkau melalui perjalanan laut, yang umumnya menjadi bagian dari rute Sumatera menuju Jawa. Selain itu, Batam memiliki beberapa pelabuhan seperti Sekupang, Batu

Ampar, Kabil, dan Batam Centre. Kemudahan akses Batam ini kemudian menjadi daya tarik investasi.

Gambar 2.2 Posisi Geografis Batam



Sumber: Mothership, 2019

Keunggulan Batam sebagai salah satu wilayah yang ditunjuk sebagai FTZ menjadikannya semakin kompetitif (Wiryawan 2018). Batam, dan juga dua wilayah FTZ lainnya, berlokasi strategis di jalur pelayaran internasional utama, seperti Singapura. Selain itu, Batam telah memiliki infrastruktur dasar khususnya untuk sektor manufaktur (Abdi 2023). Kedekatan Batam dengan Singapura secara geografis memberikan biaya produksi yang lebih rendah bagi perusahaan di Batam dan pada saat yang bersamaan memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendapatkan akses infrastruktur yang sudah ada di Singapura, seperti jaringan logistik, pusat keuangan internasional, bandara, dan pelabuhan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Qatar, dan Jepang telah menyadari strategisnya pembangunan pelabuhan di Batam (Muzwardi 2016). Mereka melihat pentingnya wilayah sekitar Riau, khususnya Batam, sebagai lokasi yang penting baik sebagai pelabuhan transit maupun sebagai basis wilayah produksi industri dalam usaha mereka untuk mengembangkan industri dan memasarkan produk mereka.

Kegiatan industri di Batam dimulai dengan masuknya investasi langsung dari Singapura yang mendirikan zona industri perdana di Batam, yaitu Batamindo, yang mulai didirikan pada tahun 1994. Sampai dengan tahun 2002, lebih dari 12 kawasan industri telah dibangun dan memberikan kesempatan kerja bagi lebih dari 172.000 orang (Adiwan F Aritenang 2009). Investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing, mencapai total sekitar \$7,3 milyar, yang melibatkan lebih dari 8000 perusahaan.

Walaupun Batam secara resmi telah ditetapkan menjadi FTZ pada tahun 2007, implementasi Batam pra dan pasca FTZ sendiri menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangannya adalah adanya tumpang tindih atau dualisme kewenangan sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah (Dalla dan Hutabarat 2018). Tumpang tindih yang dimaksud oleh eksistensi urusan pemerintah dengan jenis yang sama yang dikerjakan oleh dua lembaga pemerintah sekaligus. Dualisme kewenangan ini terjadi antara Pemerintah Kota Batam dan *Batam Industrial Development Authority* (BIDA) atau Otorita Batam. BIDA merupakan lembaga yang ditunjuk oleh presiden pada tahun 1973 berdasarkan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 untuk menjadi penggerak pembangunan Batam (Dalla dan Hutabarat 2018).

Salah satu tumpang tindih yang terjadi berkaitan dengan perurusan tanah atau lahan. Pemerintah Kota Batam mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang terkait pertanahan sebagai urusan kongkuren yang diserahkan kepada daerah. Sementara BIDA atau Otorita Batam merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam dan Undang-undang 36 Tahun 2000 mengenai

izin usaha di atas tanah. Dengan demikian, BIDA memiliki wewenang serupa dengan Pemerintah Kota Batam dalam hal pertanahan.

Seiring dengan adanya desentralisasi, BIDA bukan lagi menjadi satu-satunya otoritas yang relevan karena Pemerintah Kota Batam yang baru terpilih secara demokratis telah mengambil alih kewenangan. Namun begitu, secara umum BIDA tetap mengelola Batam dengan penjelasan tugas sebagai berikut:

1. Perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan pembangunan. BIDA turut serta bertanggungjawab terhadap infrastruktur Batam, yang mencakup jalan, listrik, air, bandara, pelabuhan, serta fasilitas umum lainnya.
2. Pengelolaan lahan sesuai dengan Rencana Induk Kepulauan.
3. Memberikan izin dan lisensi berdagang di kawasan.
4. Melakukan pemrosesan aplikasi investasi domestik dan internasional

Pembahasan terkait BIDA tidak terlepas dari perannya sebagai lembaga pertama yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia dalam mengembangkan Batam. Hal ini sendiri berkaitan dengan bagaimana Batam telah digadang-gadang sebagai wilayah perdagangan bebas sejak tahun 1970-an. Dalam arti lain, Batam telah menjadi fokus pengembangan ekonomi di Kepulauan Riau sejak diberlakukannya kebijakan FTZ pada tahun 1970-an. Hal ini pula yang menjadikan Batam menjadi berbeda dengan dua wilayah lainnya, di mana Batam menjadi wilayah pertama yang ditunjuk sebagai kawasan bebas internasional. Di sisi lainnya, Batam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap wilayah lain di sekitarnya. Penelitian Aritenang (2020) menemukan bahwa Batam menjadi mesin pertumbuhan bagi Provinsi Kepulauan Riau (Aritenang 2020). Hal ini juga berkaitan dengan posisi Batam

sebagai pulau terbesar di antara ketiga pulau yang ada, dengan populasi yang lebih besar dan kepadatan penduduk yang tinggi.

Di Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam merupakan lembaga yang melaksanakan pengelolaan pelabuhan bebas (Ulfa, Fimmastuti, dan Rahmah 2018). BP Batam merupakan entitas Badan Layanan Umum (BLU) yang beroperasi di Batam. Dalam menjalankan tugasnya, BP Batam mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam (Muzwardi 2016). Secara institusional, BP Batam dikelola oleh BIDA, dan oleh karenanya, BP Batam menjadi penjelmaan dari BIDA atau Otorita Batam. Dalam menjalankan tugasnya, BP Batam memiliki pengawasan dan arahan dari Dewan Kawasan.

Dalam mengukur dampak terhadap perkembangan wilayah Batam nantinya setelah diberlakukannya kebijakan FTZ, terdapat beberapa faktor yang dijadikan tolak ukur, antara lain sebagai berikut (Waruwu, Salsabila, dan Fathani 2023):

1. Hubungan timbal balik

Hubungan timbal balik dapat dimengerti sebagai hubungan sebab-akibat antara faktor-faktor yang memengaruhi dan yang dipengaruhi. Hubungan sebab-akibat antara karakteristik standar kebijakan kawasan perdagangan bebas dan elemen-elemen pembangunan di wilayah Batam menjadi parameter dampak pemberlakuan FTZ di Batam.

2. Ekspor-impor

Batam yang memiliki posisi yang strategis terlibat dalam berbagai sektor industri ekspor dan impor. Dengan memanfaatkan lokasi yang strategis, pemberlakuan FTZ di Batam dapat meningkatkan aktivitas ekspor

dan impor, di mana ekspor dan impor merupakan bagian dari faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dari segi pengeluaran.

3. Investasi

Ketersediaan modal sebagai sumber daya utama untuk menjaga kelangsungan bisnis, pertumbuhan, dan perluasan operasional merupakan elemen penting dalam setiap kegiatan bisnis. Investasi, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, akan merangsang aktivitas ekonomi riil atau menghidupkan kembali sektor ekonomi yang nyata. Dengan demikian, investasi memiliki pengaruh besar terhadap tingkat penciptaan lapangan kerja di Batam.

4. Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Pembangunan infrastruktur, layanan khusus, serta fasilitas umum dan sosial yang sudah ada merupakan contoh konkret bagaimana kemajuan teknologi dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kehadiran fasilitas ini tidak hanya penting untuk kelancaran operasional, tetapi juga menjadi faktor pertimbangan bagi calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Batam. Dalam FTZ Batam, masih terdapat banyak potensi di berbagai sektor yang dapat dimanfaatkan, termasuk peluang bagi investor.

Dalam kaitannya dengan industri di Batam, sektor manufaktur komponen elektronik dan komputer, termasuk peralatan audio dan video, suku cadang motif, dan produksi papan sirkuit cetak. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dengan biaya yang terjangkau. Pada tahun 2007, sektor manufaktur memegang peranan signifikan dalam jumlah investasi swasta, menyumbang sekitar 59% dari total investasi swasta, sementara sektor

perdagangan dan jasa hanya menyumbang sekitar 19% (Damuri, Christian, dan Atje Raymond 2015). Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor industri manufaktur ini sendiri merupakan salah satu daya tarik bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Batam.

2.3 Kerja Sama Indonesia dan Singapura dalam Pengembangan Batam

Perkembangan Batam, juga dua Kawasan Perdagangan Bebas lainnya, dan hubungannya dengan Singapura dimulai pada akhir tahun 1980-an. Keterkaitan itu dimulai ketika perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pemerintah Singapura membantu pengembangan Batamindo Industrial Park, yang berawal dari perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Singapura pada tahun 1989. Wakil Perdana Menteri Singapura pada saat itu, Goh Chok Tong, pertama kali mengusulkan konsep pembentukan Singapura-Johor-Riau (SIJORI) pada tahun 1994, yang selanjutnya dikenal sebagai Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (Hutchinson dan Grunsven 2018).

Rencana SIJORI ini kemudian membuka jalan penciptaan kawasan industri pertama, Batamindo, yang dibuka pada tahun 1992. Kawasan industri Batamindo sendiri merupakan operasi *joint venture* atau usaha patungan Indonesia dan Singapura, di mana pihak Singapura mengoperasikan taman tersebut sementara pihak Indonesia menyediakan fasilitas dan dukungan (Wiryawan 2018). *Joint venture* yang terjadi memuat 60% dari dua perusahaan yang terkait dengan pemerintah Singapura, yaitu Singapore Technologies Industrial Corporation dan Jurong Environmental Engineering, serta 60% dimiliki oleh Salim Group Indonesia, salah satu perusahaan milik konglomerat besar Indonesia saat itu yang

memiliki akses istimewa terhadap proyek-proyek investasi besar di Kepulauan Riau. Sejak didirikannya Batamindo saat itu, semakin banyak kawasan industri yang beroperasi di Batam seiring dengan berjalannya waktu.

Penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Indonesia dan Singapura tentang kerja sama ekonomi untuk menghidupkan kembali pengembangan Batam, juga Bintan dan Karimun, dilakukan pada bulan Juni 2006. Kerja sama antara Indonesia dan Singapura ini kemudian dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan, dan Karimun. Singapura memberikan saran kepada Indonesia terkait kebutuhan dan preferensi investor, pendekatan pemasaran, serta promosi pulau-pulau sebagai destinasi investasi manufaktur (Nadalutti 2015). Hal ini dilakukan melalui jejaring yang ada di Dewan Pengembangan Ekonomi.

Sebagai tindak lanjut dari MoU tentang pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Batam yang telah ditandatangani antara kedua negara, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 mengenai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam. Penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas atau FTZ sendiri didasarkan pada alasan kebutuhan mendesak, terutama karena stagnansi ekonomi Indonesia saat itu. Pemerintah merasa perlu untuk dengan segera menjadikan Batam sebagai FTZ karena secara de facto, Batam telah menerapkan kebijakan sebagaimana yang dilakukan dalam kawasan perdagangan bebas (Anugrahini 2015). Hal ini sendiri dapat dilihat dari adanya insentif fiskal yang diberikan terhadap arus barang masuk dan keluar Batam selama beberapa tahun terakhir sebelum Batam secara resmi ditetapkan sebagai FTZ.

Dengan adanya dorongan untuk membentuk lebih banyak perjanjian perdagangan bebas, Singapura memasukkan klausul terkait *Integrated Outsourcing Initiative* (ISI) ke dalam FTA-nya untuk memberikan keuntungan bagi Batam, Bintan, dan Karimun (Budiyantini dan Amalia 2021). Klausul ISI ini sendiri termasuk dalam FTA Singapura dengan Amerika Selatan yang mulai berlaku pada Januari 2004. Klausul ini mengakui bahwa banyak produk Singapura yang komponennya dialihdayakan ke wilayah tetangga. Dengan memasukkan klausul ini, 266 jenis produk IT dan produk terkait medis yang diproduksi di basis produksi lepas Pantai seperti Batam, dapat dianggap berasal dari Singapura. Hal ini akan membuat produk yang diproduksi di kawasan FTZ di Indonesia lebih kompetitif dan menguntungkan. Di sisi lain, Singapura juga diuntungkan karena impor bebas tarif membuat ekspor Singapura lebih kompetitif dalam perjanjian perdagangan bebasnya dengan Amerika Serikat.

Dalam konteks peningkatan kapasitas, *steering committee* sepakat untuk menyelenggarakan serangkaian kursus pelatihan tambahan bagi pejabat di FTZ Batam setelah menyelesaikan tahap kedua dari pelatihan sebelumnya. Tahap kedua ini sendiri dilaksanakan pada bulan November 2007 dan melibatkan materi terkait pengalaman Singapura dalam bidang bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan perencanaan kota (Kam dan Kee 2009). *Steering committee* turut menerima informasi bahwa Institut Pendidikan Teknik Singapura telah menyelesaikan program pelatihan mengenai pelaksanaan kursus Mekatronika untuk instruktur dan pengelola kursus di Politeknik Batam.

Sebagai upaya kerja sama untuk mempromosikan Batam, Indonesia dan Singapura melakukan kegiatan promosi bersama di hadapan sekitar 200 pengusaha

Jepang dalam sebuah seminar yang dilaksanakan di Tokyo, Jepang, pada 30 Juni 2008 (Kam dan Kee 2009). Seminar ini sendiri bertujuan untuk menarik minat investasi dari para investor Jepang dengan memperkenalkan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan mengkomunikasikan perkembangan yang telah dicapai oleh Indonesia dan Singapura dalam menciptakan suasana yang bersahabat bagi para investor di wilayah tersebut. Promosi ini diprakarsai oleh Menteri Perdagangan Indonesia Mari Elka Pangestu dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Lim Hng Kiang. Indonesia dan Singapura turut menegaskan bahwa dengan Kawasan Perdagangan Bebas Batam yang dimiliki keduanya, kolaborasi keduanya dapat saling melengkapi dan memperkuat kerja sama di dalam kerangka ASEAN. Menteri Perdagangan Indonesia Mari Elka Pangestu juga turut menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan baru seperti undang-undang investasi, reformasi perpajakan, dan perlindungan investasi telah dibuat dan akan diimplementasikan secara konsisten di kawasan perdagangan bebas. Dengan promosi yang dilakukan oleh kedua negara, beberapa perusahaan Jepang saat itu telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi dan akan berinvestasi di bidang elektronik, alat tulis kantor, serta konstruksi.

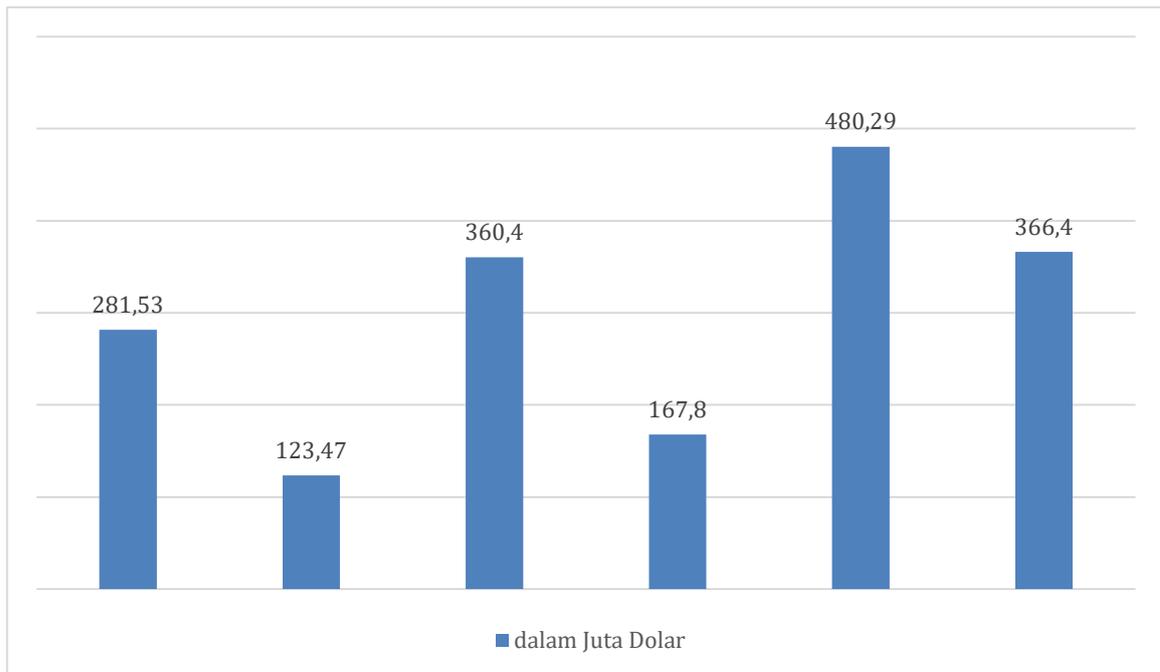
Selain inisiasi pembentukan kelompok kerja dan upaya promosi yang telah dilakukan, pemerintah Singapura juga mendirikan kantor konsulat jenderal di Batam pada bulan Desember 2008. Pendirian konsulat jenderal di Batam, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Singapura, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor letak geografisnya, tetapi juga secara erat terkait dengan implementasi kerja sama antara Indonesia dan Singapura dalam pembentukan serta pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas di Batam. Dalam

konteks tersebut, kerja sama ekonomi di FTZ menjadi salah satu motif pemerintah Singapura mendirikan konsulat di Batam (The Jakarta Post 2009). Dengan adanya konsulat jenderal di Batam, kedua pemerintah mengharapkan terciptanya kolaborasi yang lebih kuat di masa mendatang dalam hal kepentingan bersama dan kerja sama yang lebih efektif antara mereka.

Dalam peresmian Batam sebagai FTZ pada tahun 2009, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono turut menyinggung terkait kerja sama Indonesia dengan Singapura. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Singapura dilakukan guna meningkatkan investasi di kawasan yang telah ditunjuk sebagai FTZ (Ortax 2009). Dalam pelaksanaannya, kerja sama antara Indonesia dan Singapura dilakukan melalui adanya kelompok kerja, yaitu *join working group* dan *join steering committee*. *Working group* antara Indonesia dan Singapura diketuai oleh Ketua Dewan Pembangunan Ekonomi Singapura Lim Siong Guan dan Menteri Perdagangan Indonesia Mari Elka Pangestu, sedangkan *steering committee* antara kedua negara diketuai oleh Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Lim Hng Kiang dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Boediono.

Singapura merupakan investor terbesar di Batam. Data yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia menunjukkan data investasi Singapura di Batam. Walaupun dapat dikatakan investasi Singapura mengalami fluktuasi, Singapura tetap menyandang gelar sebagai negara investor di Batam selama periode waktu tersebut. Artinya, investasi Singapura masih lebih besar daripada negara-negara lain yang juga berinvestasi di Batam.

Gambar 2.3 Nilai Investasi Singapura di Batam Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2024

2.4 Perubahan *Free Trade Zone* (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Iklm investasi di Batam menunjukkan penurunan potensi karena adanya konflik tenaga kerja serta ketidakjelasan wewenang antara Badan Pengelola Batam dan Pemerintah Kota Batam. Dalam konteks tenaga kerja, konflik berkaitan dengan upah minimum yang terkadang dapat meluas menjadi konflik yang anarkis (DPR RI 2016). Di sisi lainnya, ketidakjelasan wewenang antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam berkaitan dengan adanya dualisme dalam pengelolaan Batam.

Secara eksternal, Batam turut mengalami penurunan daya saing di wilayah regional. Konsep dari *Free Trade Zone* (FTZ) tidak lagi menjadi prioritas bagi negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara (Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian RI 2016a). Seiring dengan globalisasi dan meningkatnya kerja sama antarnegara di kawasan, tren yang berkembang saat ini adalah pengembangan *Special Economic Zone* atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sebagai contoh, KEK yang berada di Shenzhen, China menyumbang 75% dari total pendapatan wilayah Shenzhen yang mencapai US\$114,5 miliar (DPR RI 2016).

Seiring dengan adanya penurunan daya saing secara internal dan eksternal, Presiden Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2016 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 2016a). Keppres tersebut menegaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan memimpin pembentukan Dewan Kawasan bersamaan dengan segenap jajaran pemerintahan lainnya yang berperan sebagai anggota. Penerapan Keppres ini sekaligus mencabut Keppres Nomor 18 Tahun 2013 yang berhubungan dengan pembentukan Dewan Kawasan sebelumnya.

Walaupun pemerintah Indonesia telah mengesahkan kebijakan yang menetapkan Batam sebagai KEK, ada beberapa kelompok yang tidak setuju dengan keputusan tersebut, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam dan BP Batam. Pihak-pihak ini berpendapat bahwa Batam tidak sesuai untuk dijadikan sebagai KEK (Bani 2019). Ketidaksetujuan ini juga datang dari kalangan pengusaha Batam. Kalangan pengusaha dan asosiasi di Batam menganggap bahwa status KEK lebih condong terhadap kepentingan politis yang hanya akan menguntungkan penguasa, dibandingkan dengan status FTZ yang meningkatkan gairah usaha (Lavinda 2018).

Seiringan dengan hal itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjalankan kebijakan KEK di dalam kawasan perdagangan bebas. Dalam konteks tersebut, KEK Batam akan berfokus pada wilayah-wilayah tertentu yang telah ditunjuk, dan kebijakannya berada dalam kerangka kawasan perdagangan bebas. Penerapan KEK memiliki beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk meningkatkan investasi dan memajukan wilayah-wilayah ekonomi yang baru berkembang (Naim 2021). Secara umum, KEK nantinya akan berfungsi sebagai titik sentral industri, perdagangan internasional, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bernilai tinggi guna meningkatkan daya saing nasional (CSIS 2015).

Transformasi Batam menjadi KEK turut sesuai dengan kerangka ASEAN yang ditujukan untuk mengeliminasi ketimpangan regional dan negara-negara anggota (Ramadhan 2022). Langkah ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat integritas ekonomi di kawasan ASEAN serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Hal ini juga berkaitan dengan pilar-pilar dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yaitu pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang rata dan berkeadilan, serta kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.

Dalam konteks fasilitas, KEK menyediakan berbagai fasilitas tambahan yang tidak tersedia dalam kerangka kawasan perdagangan bebas sebelumnya. Ini termasuk adanya *tax holiday* dengan pengurangan pajak hingga 100% dengan syarat-syarat tertentu (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 2016a). Selain itu, KEK juga menawarkan kemudahan dalam hal urusan keimigrasian,

seperti visa kunjungan saat kedatangan dengan durasi 30 hari yang dapat diperpanjang hingga lima kali.

Tabel 2.1 Perbandingan Fasilitas FTZ dan KEK

No.	Jenis Fasilitas	FTZ	KEK
1.	Fasilitas Pajak Penghasilan Badan		
	Insentif <i>investment allowance</i>	x	✓
	Percepatan amortisasi	x	✓
	Pajak dividen	x	✓
	<i>Tax holiday</i>	x	✓
2.	Fasilitas PPN dan PPnBM		
	Bebas PPN impor	✓	✓
	Pembebasan PPN atau PPnBM	✓	✓
	Penyerahan tidak dipungut ke penerima lainnya	✓	✓
	Pengembalian PPN kepada pribadi pemegang paspor luar negeri	x	✓
3.	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai		
	Penangguhan bea masuk	x	✓
	Pembebasan bea masuk	✓	✓
	Pembebasan cukai	✓	✓

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2015

Dalam pelaksanaan kebijakan KEK, BP Batam tetap menjadi otorita yang berpengaruh di samping Dewan KEK. Dalam konteks pelayanan terpadu, BP Batam melakukannya melalui unit khusus, yaitu Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang berfungsi dalam mengelola perizinan di Batam. Perizinan yang diurus termasuk izin pertanahan, berusaha, lalu lintas barang, titik reklame, dan sebagainya. BP Batam menyediakan layanan perizinan yang terintegrasi secara digital melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS). Perizinan yang dikelola oleh PTSP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Seiring dengan transformasi ke KEK, kerja sama Indonesia dan Singapura dalam pengembangan Batam sendiri semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Singapura turut terlibat dalam pembangunan destinasi KEK Nongsa Digital Park, sebuah pusat teknologi dan inovasi yang terletak di Semenanjung Nongsa, Batam, yang berdekatan dengan Singapura (J. Anwar dkk. 2023). Nongsa Digital Park merupakan salah satu Kawasan Ekonomi Khusus Digital Indonesia yang menjadi realisasi dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan Singapura guna menggalakkan pertumbuhan industri digital di Batam. Pembangunan Nongsa Digital Park menjadi bagian dari kolaborasi perusahaan Indonesia dan Singapura yang didorong oleh pemerintah kedua negara melalui lembaga-lembaga terkait seperti BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga lembaga pemerintah Singapura seperti *Economic Development Board* (EDB) (R. D. Putra 2021).

Selain Nongsa Digital Park, penetapan KEK hasil kerja sama Indonesia dan Singapura di FTZ Batam turut berada di Batam Aero Technic. KEK Batam Aero Technic memiliki fokus utama pada kegiatan pemeliharaan dan perbaikan pesawat terbang (BP Batam 2021c). Kawasan ini didirikan dengan tujuan mendukung perkembangan industri aviasi yang ada di Indonesia. KEK Batam Aero Technic, yang didirikan oleh Indonesia dan Singapura di atas lahan seluas sekitar 30 hektar, bertujuan untuk menarik investasi sebesar Rp. 6,2 triliun dan diestimasi akan

memberikan lapangan kerja untuk sekitar 9.976 orang (Kementerian Perindustrian RI 2021).

BAB III

DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP SINGAPURA DALAM SEKTOR INDUSTRI DI BATAM MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

Pada bab ini, penulis akan mencoba menjawab rumusan masalah dengan mengaplikasikan konsep diplomasi ekonomi yang dicetuskan oleh Nicholas Bayne & Stephen Woolcock. Dalam bukunya, Bayne dan Woolcock memaparkan lima variabel yang menjadi pertimbangan dalam diplomasi ekonomi. Kelima variabel tersebut adalah kekuatan ekonomi relatif, rezim internasional, kepentingan, institusi dan pengambilan keputusan dalam negeri, serta faktor ideasional. Dengan mempertimbangkan variabel-variabel ini, penulis akan menyelidiki bagaimana konsep diplomasi ekonomi dapat diterapkan secara efektif dalam konteks diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam meningkatkan sektor industri di Batam melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

3.1 Kekuatan Ekonomi Relatif

Bagian ini mencoba mengaplikasikan variabel kekuatan ekonomi relatif. Dalam bukunya, Bayne dan Woolcock menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi relatif mempengaruhi negosiator dalam suatu diplomasi ekonomi. Semakin besar ekonomi suatu negara, maka kekuatan pasar yang dimiliki juga lebih besar (Bayne dan Woolcock 2017). Dalam konteks tersebut, kekuatan ekonomi Singapura menjadi faktor pertimbangan Indonesia, mengingat ekonomi Singapura yang lebih maju sehingga kekuatan pasar yang dimiliki lebih besar. Sebagai akibatnya,

Indonesia perlu mempertimbangkan dengan cermat strategi dan pendekatan dalam diplomasi ekonominya dengan Singapura.

Sebagai pusat keuangan utama di kawasan Asia Pasifik, Singapura telah lama mendapatkan reputasi sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang paling maju dan canggih di dunia. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Singapura tumbuh sebesar 3,2%. Pertumbuhan utamanya didorong oleh sektor elektronik, transportasi, dan manufaktur biomedis (Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Singapura 2019). Sementara itu, sektor lain seperti teknik presisi, bahan kimia, dan manufaktur umum juga mengalami perkembangan pada tahun tersebut. Begitu juga dengan industri penghasil jasa yang secara kolektif tumbuh sebesar 3% pada tahun 2018.

Sektor industri, khususnya manufaktur, telah menjadi pendorong utama perekonomian Singapura sejak kemerdekaannya (Hirschmann 2023). Dengan fokusnya pada otomatisasi, inovasi, riset, dan pengembangan di sektor manufaktur, serta tingkat infrastruktur yang tinggi, Singapura telah berhasil menarik perusahaan-perusahaan manufaktur terkemuka di dunia untuk beroperasi di negara tersebut. Manufaktur tersebut termasuk pabrik pengecoran semikonduktor murni seperti GlobalFoundries dan United Microelectronics Corp, serta raksasa farmasi global GlaxoSmithKlein, Novartis, dan Pfizer.

Sebagai negara dengan pasar domestik kecil yang bergantung pada impor pangan, energi, dan bahan baku industri, Singapura menempatkan prioritas tertinggi pada sistem perdagangan multilateral yang diwujudkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Fokus utama kebijakan perdagangan Singapura adalah memelihara kepentingan perdagangannya dengan memastikan terciptanya

lingkungan perdagangan internasional yang bebas dan terbuka (ITA 2024). Bersamaan dengan dukungannya terhadap WTO, Singapura juga mendukung upaya perdagangan dilakukan dalam konteks regional, di mana salah satunya adalah dalam ASEAN.

Dalam kaitannya dengan *outward investment* atau investasi keluar, Singapura tidak mengekang investor domestiknya untuk berinvestasi di luar negeri. Pemerintah Singapura mendorong investasi ke luar negeri melalui Enterprise Singapore, sebuah lembaga yang berada di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, yang memberikan informasi pasar, hubungan bisnis, serta bantuan keuangan dan hibah kepada perusahaan yang melakukan internasionalisasi. Meskipun perusahaan ini memiliki cakupan global dan mengoperasikan pusat-pusat di kota-kota besar di seluruh dunia, sebagian besar pusat-pusat internasionalnya terletak di negara-negara mitra perdagangan dan investasi utama, seperti Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan ASEAN (U.S. Department of State 2023).

Singapura tidak memiliki undang-undang terkait penanaman modal di seluruh perekonomian yang mengatur penanaman modal dalam dan luar negeri. Investasi sendiri diatur oleh undang-undang yang berlaku secara umum, misalnya hukum umum kontrak dan *Singapore Companies Act* atau Undang-Undang Perusahaan Singapura, dan peraturan perundang-undangan yang spesifik pada sektor tertentu (WTO 2021). Secara umum, Singapura juga tidak memiliki perbedaan dalam perlakuan terhadap penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

Sebagai negara dengan luas wilayah yang kecil, Singapura dihadapkan dengan lahan yang terbatas untuk melaksanakan aktivitas bisnis. Terlebih, Singapura juga dihadapkan dengan adanya kenaikan biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, Singapura menerapkan kebijakan “regionalisasi” dan mendorong perusahaan yang berbasis di negaranya untuk mengalihkan operasinya ke luar negeri (Yeo 2019). Hal ini menjadi respons terhadap keterbatasan sumber daya dan meningkatnya biaya operasional yang dihadapi oleh Singapura.

Kebijakan Singapura yang mendukung perusahaan untuk melakukan operasi dan menanamkan investasi di luar negeri memberikan pengaruh terhadap Indonesia. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki potensi sebagai destinasi perusahaan Singapura menanamkan modalnya ataupun melakukan operasi bisnisnya di luar negeri (Fernandez, Almaazmi, dan Joseph 2020). Pasalnya, Indonesia memiliki posisi yang strategis dari perspektif Singapura, karena adanya Batam sebagai penghubung langsung Indonesia dan Singapura. Selain itu, Indonesia memiliki tenaga kerja yang melimpah. Di sisi lainnya, Indonesia memanfaatkan Singapura sebagai katalisator pengembangan ekonomi dan sektor-sektor tertentu yang ada melalui kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia.

Lingkungan politik Singapura yang stabil, institusi yang kuat, dan kerangka peraturan yang transparan memberikan lingkungan bisnis yang kondusif yang menumbuhkan kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks tersebut, Indonesia menyadari pentingnya kerja sama dengan Singapura untuk mendorong stabilitas regional dan prediktabilitas ekonomi, yang penting untuk

menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan KEK Batam.

Tentu saja, terdapat langkah-langkah dan usaha diplomasi serta negosiasi dari suatu negara untuk mempercepat aktivitas perdagangan internasional serta mengatur pengelolaan wilayah perbatasan sebagai langkah awal melalui kesepakatan kerja sama. Dalam konteks studi kasus ini, kerja sama tersebut dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura. Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II, Indonesia mengusulkan kebijakan *Free Trade Zone* yang kemudian berfokus menjadi KEK. Langkah tersebut didorong untuk melakukan upaya diplomasi dan negosiasi guna memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri, terkhususnya dalam sektor industri.

3.2 Rezim Internasional

Bagian ini berfokus pada penerapan variabel rezim internasional dalam diplomasi ekonomi. Dalam bukunya, Bayne dan Woolcock menyatakan bahwa rezim internasional mempengaruhi hasil dari diplomasi ekonomi. Rezim berperan dalam memfasilitasi kerja sama dengan mengurangi biaya transaksi, dan demikian memungkinkan negosiasi berulang di mana kesepakatan lebih lanjut dapat dibangun berdasarkan kerja sama di masa lalu (Bayne dan Woolcock 2017). Dalam konteks diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura melalui pengembangan KEK, variabel rezim berkaitan dengan adanya *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan lahirnya *Memorandum of Understanding* (MoU) Indonesia dan Singapura terkait pengembangan kawasan Batam pada 2006 silam.

Indonesia memulai diplomasi dengan AFTA, salah satunya melalui upaya untuk mencapai kesepakatan terkait pengembangan Batam sebagai bagian dari kerja sama dengan Singapura. Hal ini dilakukan melalui kesepakatan yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus pada tahun 2006 di Kota Batam. AFTA merupakan kesepakatan antara negara anggota ASEAN yang disepakati pada tahun 1992. Pada tahun 1992, ketika AFTA didirikan, anggota asli ASEAN terdiri dari enam negara: Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand (Ishikawa 2021). Setelahnya, negara-negara lain, seperti Vietnam, Laos, dan Myanmar bergabung setelah melakukan ratifikasi dengan ASEAN.

Indonesia, sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, terus berperan aktif dalam kemajuan organisasi regional ini, terutama dalam implementasi AFTA. Meskipun telah menjadi salah satu penandatangan AFTA sejak 1992, Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang. Namun demikian, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya tata kelola dalam memanfaatkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh negara (Permatasari 2020).

Sebagai perjanjian yang dibawah oleh ASEAN, AFTA mendorong negara anggotanya untuk meningkatkan investasi asing. Investasi asing dipercayai dapat memperkuat bidang ekonomi, yang pada gilirannya dapat membawa manfaat ekonomi baik secara lokal maupun global (Putri 2022). Dengan adanya peningkatan investasi asing yang berkelanjutan, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang diiringi dengan terciptanya lapangan kerja dan transfer teknologi meluas.

Landasan AFTA dan bagaimana ASEAN mendorong terjadinya kerja sama antar negara anggota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada menjadi cikal bakal dari terjadinya MoU antara Indonesia dan Singapura terkait pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang ditandatangani pada 25 Juni 2006 di Kota Batam. MoU tersebut, yang didasarkan oleh prinsip saling menguntungkan, memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas perdagangan barang dan jasa (Achmad dan Nasir 2022).

Pada tahun 2010, AFTA sepakat untuk menghapuskan bea masuk untuk Indonesia, Thailand, dan Singapura. Momentum ini juga menandai dibukanya pasar bebas Asia Tenggara. Pembukaan AFTA tersebut kemudian memberikan kesempatan bagi negara seperti Indonesia untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, khususnya aliran investasi asing, ke negaranya (Putri 2022). Kesempatan ini menjadi hal yang penting bagi Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di tengah dinamika perubahan zaman.

AFTA menjadi cikal bakal dari kerja sama negara anggota ASEAN, di mana dalam kasus ini adalah Indonesia dengan Singapura. Salah satu momentum signifikan tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU mengenai tata kelola Batam, Bintan, dan Karimun pada tahun 2006. Selain itu, penandatanganan MoU 2006 juga tidak lepas dengan kaitannya dengan rezim internasional lainnya yang memiliki aturan-aturan di dalamnya, yaitu GATT. Upaya penandatanganan MoU untuk melindungi suatu kawasan dengan kebijakan yang tidak merugikan kepentingan nasional disesuaikan dengan Pasal XXIV GATT yang memperbolehkan pembentukan kawasan perdagangan bebas serupa (Salisty)

2021). Pasal III dan Pasal IV TRIMs juga memberikan pengecualian bagi negara berkembang dalam mengatur investasi asing, yang pada dasarnya konsisten dengan prinsip-prinsip GATT.

MoU KEK yang ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Singapura pada prinsipnya bertujuan untuk mempermudah aktivitas dalam sektor-sektor yang disebutkan pada Pasal 3 Ayat (2) dari kesepakatan tersebut, seperti investasi, keuangan, perpajakan, imigrasi, ketenagakerjaan, pengembangan kapabilitas, dan lebih diperinci dalam ayat (3). Di sisi lainnya, Singapura akan memberikan dukungan dalam pembangunan kapasitas dan jaringan untuk memasuki pasar internasional atau liberalisasi investasi. Seluruh langkah yang dilakukan merupakan langkah-langkah yang telah disetujui oleh kedua negara untuk meningkatkan iklim investasi, khususnya di Batam. Dalam konteks terkait berlakunya MoU KEK ini sendiri telah diatur dalam Pasal 10, di mana pemberlakuan MoU KEK mulai berlaku sejak adanya pemberitahuan terakhir yang melibatkan seluruh pihak melalui saluran diplomatik, setelah memastikan persyaratan hukum domestik telah terpenuhi (Achmad dan Nasir 2022).

3.3 Kepentingan

Bagian ini berfokus pada penerapan variabel kepentingan dalam diplomasi ekonomi. Dalam bukunya, Bayne dan Woolcock menyatakan bahwa negara atau pihak-pihak dalam negosiasi mencari keseimbangan antara preferensi kepentingan yang beragam untuk memaksimalkan utilitas (Bayne dan Woolcock 2017). Dalam konteks tersebut, negara berupaya untuk menemukan kepentingan yang maksimal

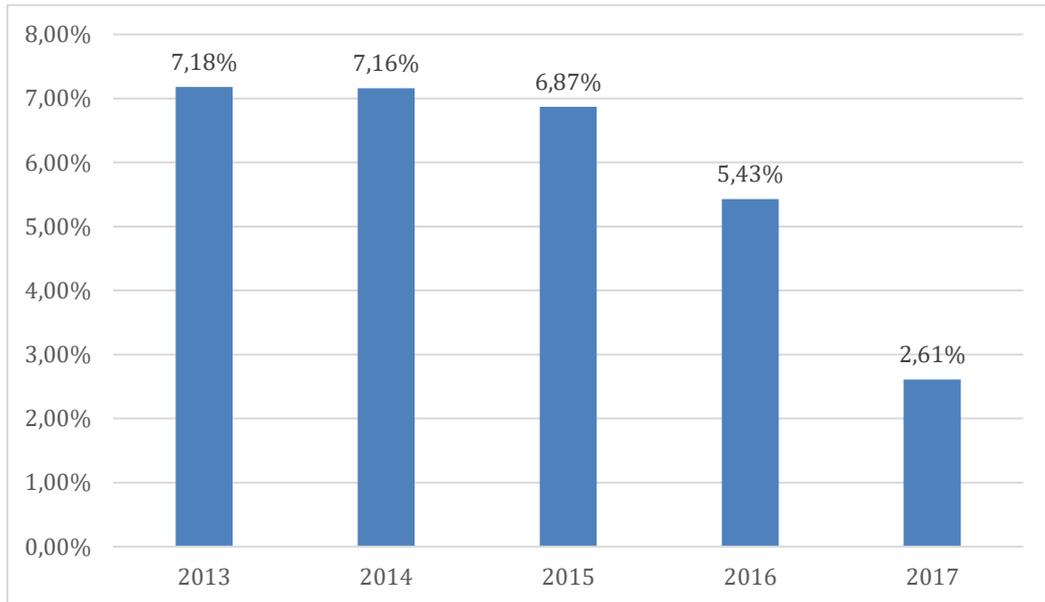
dan memfasilitasi kepentingan dari pihak-pihak di dalamnya. Dalam konteks penelitian ini, variabel kepentingan berkaitan dengan kepentingan Indonesia untuk meningkatkan sektor industri di Batam.

Dalam bukunya, Bayne dan Woolcock (2017) menyatakan bahwa variabel kepentingan ini berkaitan dengan bagaimana kepentingan para pihak yang terlibat dapat terwadahi untuk tercapainya utilisasi maksimal. Dalam konteks pengembangan KEK Batam, dapat terlihat bahwa pemerintah Indonesia berupaya untuk menjembatani kepentingan dari pihak di domestik. Hal ini dapat terlihat karena adanya kritik-kritik dari berbagai pihak terkait dengan pengembangan KEK Batam. Kritik pertama datang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam yang menilai bahwa Batam tidak cocok untuk menjadi KEK karena kegagalan di masa lalu dan infrastruktur yang ada telah berjalan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 2016a). Selain itu, terdapat kritik dari Asosiasi Pengusaha Indonesia terkait dengan kepentingan pengusaha yang dinilai akan semakin sulit menjalankan usaha dengan adanya pengembangan KEK Batam.

Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Batam, merupakan pintu masuk utama bagi investasi, baik dari dalam maupun luar negeri (Istiqomah dan Santoso 2022). Batam telah dikenal sebagai tempat yang menarik bagi investor yang ingin mengalokasikan modal mereka di daerah tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi Indonesia, khususnya di Batam, mengalami penurunan. BP Batam menyatakan bahwa penurunan ekonomi Batam merupakan hasil langsung dari perlambatan ekonomi global. Hal ini dapat terjadi karena industri di Batam merupakan cabang dari perusahaan-induk yang beroperasi di luar negeri. Ketika terjadi perlambatan ekonomi global, perusahaan induk cenderung

melakukan efisiensi biaya dengan menutup cabang-cabangnya, termasuk yang banyak berlokasi di Batam (Purba dan Saputra 2018).

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Batam Tahun 2013-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Penurunan ekonomi Batam juga tidak lepas kaitannya dengan status Batam sebagai *Free Trade Zone* (FTZ) sebelumnya. Batam menghadapi persaingan dari kawasan FTZ lainnya di wilayah Cina Selatan dan ASEAN (Purba dan Saputra 2018). Beberapa pesaing utama Batam adalah Waigaoqiao di Shanghai, China; Penang dan Johor Iskandar di Malaysia; serta Tan Thuan di Vietnam. Kawasan FTZ Malaysia menjadi rival utama bagi FTZ Batam karena kedua wilayah tersebut berada pada posisi geografis yang dekat dengan Singapura dan Selat Malaka.

Penurunan pertumbuhan ekonomi Batam juga diikuti dengan penurunan pertumbuhan sektor industri di Batam yang menurun dari 6,89% pada tahun 2015 menjadi 4,62% pada tahun 2016 (Ningsih 2018). Penurunan pertumbuhan sektor industri ini kemudian turut berdampak pada penurunan daya beli masyarakat

terhadap barang dan jasa. Dalam konteks ini, maka pemerintah Indonesia memerlukan upaya dan strategi, di mana hal ini dilakukan dengan menargetkan Singapura, sesama negara anggota ASEAN dan AFTA, sebagai tujuan diplomasi untuk memulihkan ekonomi serta mengembangkan sektor industri di Batam dengan adanya pengembangan KEK.

Pengaruh sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi Batam berkaitan dengan adanya *local multiplier effect* yang meliputi pembangunan fasilitas di kawasan industri yang juga merangsang pertumbuhan ekonomi di sekitarnya (Budiman 2019). Contohnya adalah peningkatan aktivitas ekonomi untuk mendukung para pekerja. Selain itu, Batam pada awalnya memang ditetapkan sebagai pusat industri yang mampu mendukung seluruh kegiatan industri di Provinsi Kepulauan Riau, yang kemudian dilengkapi dengan infrastruktur distribusi yang baik. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia menjadikan sektor industri sebagai fokus utama dalam pengembangan KEK guna memulihkan perekonomian Batam yang sempat merosot sampai dengan tahun 2011.

Pemerintah Indonesia mulai melontarkan wacana perubahan FTZ menjadi KEK sejak Januari 2016 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 2016b). Pemerintah Indonesia menilai KEK sebagai salah satu cara untuk memulihkan persoalan yang ada di Batam, khususnya penurunan pertumbuhan ekonomi dan sektor industri. Batam perlu untuk bertransformasi karena konsep FTZ sebelumnya dinilai telah mulai ketinggalan dengan tren terkini. Dalam siaran pers yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mereka mengambil contoh kawasan Iskandar Regional Development Authority (IRDA) di Malaysia, serta KEK Shenzhen di China yang secara sukses menghasilkan 75% dari

total pendapatan wilayah Shenzhen senilai US\$ 114,5 miliar (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 2016a).

Dari sisi dalam negeri, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa pengembangan KEK Batam akan dilakukan dengan membangun destinasi khusus, dan melakukannya dengan berdiplomasi dengan Singapura. Hal ini dapat tercermin bahwa pemerintah Indonesia berupaya untuk menengahi kepentingan dari berbagai pihak dengan pada akhirnya membiarkan FTZ berjalan seperti sedia kala, namun dengan adanya kawasan khusus yang menjadi KEK di Batam (Fatimah, Simamora, dan Silitonga 2022). Fenomena ini dapat dipahami sesuai dengan apa yang diungkapkan Bayne dan Woolcock (2017) bahwa kepentingan dari berbagai pihak, termasuk kepentingan pemerintah, sektor industri, serikat pekerja, dan bahkan masyarakat sipil membentuk preferensi dan pengambilan keputusan dalam diplomasi ekonomi.

Keputusan untuk melakukan diplomasi ekonomi dengan Singapura dalam pengembangan KEK dilakukan untuk tercapainya apa yang dikenal dalam konsep diplomasi ekonomi sebagai "*utility maximization.*" Maksimalisasi utilitas dalam diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia utamanya berkaitan dengan segi ekonomi, karena diplomasi ekonomi dilakukan untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan industri di Batam. Pemilihan Singapura berkaitan dengan target pencapaian dari maksimalisasi utilitas tersebut, karena Singapura terus menjadi investor terbesar di sektor industri Batam.

Dalam aktivitas perdagangan dan investasi, Indonesia menghadapi berbagai isu yang memerlukan negosiasi dengan negara-negara lain. Terutama dalam hal investasi, terdapat hambatan perdagangan seperti tarif bea masuk ke negara tujuan.

Untuk mengatasi hal ini, Indonesia mengeluarkan kebijakan agar tarif bea masuk dapat dikurangi dan bahkan dihapuskan. Indonesia menjalankan negosiasi dengan Singapura sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kerja sama bisnis secara efektif serta memberikan legitimasi dan izin untuk beroperasi.

3.4 Institusi dan Pengambilan Keputusan Dalam Negeri

Bagian ini berfokus pada penerapan variabel institusi dan pengambilan keputusan dalam negeri dalam diplomasi ekonomi. Dalam bukunya, Bayne dan Woolcock menyampaikan bahwa institusi berperan dalam menetapkan keseimbangan kepentingan dan cara-cara yang digunakan, serta melaksanakan prosedur pengawasan negosiasi. Pada variabel ini, terdapat penekanan pada hubungan prinsipal-agen, di mana prinsipal sebagai pembuat keputusan dan agen sebagai pelaksana. Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Indonesia berperan sebagai prinsipal dan BP Batam berperan sebagai agen.

Sejak FTZ diberlakukan di Batam, Pemerintah Pusat telah menunjuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, yang lebih dikenal sebagai Badan Pengusahaan (BP) Batam, untuk mengelola kebijakan FTZ. BP Batam tidak hanya memberikan jaminan hukum kepada investor yang tertarik berinvestasi di Batam, tetapi juga berupaya meningkatkan daya saing wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk menarik minat investor asing agar berinvestasi di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan mengembangkan Batam sebagai pusat industri, diperlukan pemenuhan prasyarat utama yang melibatkan pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik bertujuan untuk memudahkan arus investasi dengan menyediakan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas lainnya. Sementara itu, pembangunan non-fisik ditujukan untuk menarik minat investor dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang memudahkan (Syuzairi dkk. 2022). Pandangan ini didasarkan pada ketentuan dalam peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Nomor 10 Tahun 2011. Salah satu tugas BP Batam adalah mengelola, mengembangkan, dan membangun Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sementara salah satu fungsinya adalah memfasilitasi kegiatan penanaman modal (BP Batam 2021a).

Dalam kaitannya dengan kebijakan, pemerintah pusat menetapkan sejumlah aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan KEK dan kemudian diimplementasikan oleh BP Batam sebagai regulatornya. Aturan dan kebijakan ini dirancang untuk memberikan landasan hukum dan arah yang jelas bagi pelaksanaan dan pengelolaan KEK secara meluas. Hal ini juga berkaitan dengan dominasi peran BP Batam dalam diplomasi ekonomi terhadap Singapura secara khusus.

Tabel 3.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Implementasi dari BP Batam

No.	Pemerintah Indonesia	BP Batam
1.	Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	Mempermudah perizinan melalui penyempurnaan pelayanan berbasis elektronik Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS)
2.	Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic	Menjadi regulator sekaligus mempromosikan peluang investasi dan kerja sama di KEK Batam Aero Technic ke negara lain, khususnya Singapura
3.	Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa	Menjadi regulator sekaligus mempromosikan peluang investasi dan kerja sama di KEK Nongsa ke negara lain, khususnya Singapura
4.	Meresmikan kesiapan operasi KEK Nongsa melalui Keputusan Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa	Berkomitmen dalam mendukung kebutuhan infrastruktur dan perizinan, dan memfasilitasi penanganan permasalahan

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber (Kantor Imigrasi Batam 2022; BP Batam 2023b; 2023a; 2022a)

Pengembangan KEK sendiri erat kaitannya dengan pengembangan industri. Secara umum, dari 20 KEK yang telah terbangun di seluruh Indonesia, separuhnya merupakan KEK yang memiliki fokus pada sektor industri (Dewan Nasional KEK 2024). Oleh karenanya, dalam diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Singapura, sektor industri menjadi fokus yang diupayakan. Salah satu upaya dari pemerintah Indonesia melalui BP Batam yang dapat dikatakan sangat terkait dengan sektor industri terhadap Singapura adalah kehadirannya pada seminar daring bertema “*Industrial Transformation and Its Opportunities*” yang

diselenggarakan oleh Singapore Manufacturing Federation (SMF), Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura (HMS 2020). SMF sendiri merupakan organisasi Singapura terbesar yang mewakili kepentingan manufaktur dan industri terkait manufaktur yang telah berdiri sejak tahun 1932. Dalam seminar yang dilaksanakan pada 15 September 2020 tersebut, BP Batam memberikan pemaparan terkait perkembangan serta peluang investasi di KEK Batam. BP Batam juga melakukan persuasi agar SMF berinvestasi di Batam dengan menyebutkan terkait insentif investasi yang akan mempermudah dalam proses berinvestasi di KEK Batam.

Gambar 3.2 BP Batam dalam Seminar Daring dengan Singapura



Sumber: Bisnis Sumatera, 2020

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan peran BP Batam dalam upaya diplomasi ekonomi terhadap Singapura, BP Batam juga turut memperkenalkan Kepala Urusan Ekonomi Internasional BP Batam untuk Singapura. Jabatan ini sendiri dijabat oleh Michael Goutama yang juga menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite Singapura. Perkenalan adanya Kepala Urusan Ekonomi Internasional BP Batam untuk Singapura dilaksanakan

dalam seminar yang sama yang diadakan oleh SMF pada 2020. Posisi baru di BP Batam yang bertanggung jawab atas urusan ekonomi internasional dengan Singapura merupakan sebuah inovasi yang terkait dengan perkembangan struktural dan organisasi dalam BP Batam (Bani 2020). Sebelumnya, peran yang berkaitan dijalankan oleh Liaison Officer (LO). Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan kebutuhan guna meningkatkan kemudahan investasi dan urusan ekonomi lainnya, BP Batam mengangkat Kepala Urusan Ekonomi Internasional pada tahun 2020 untuk memperkuat hubungan BP Batam dengan Singapura.

Sebagai prinsipal, pemerintah pusat bertanggungjawab dalam mengambil keputusan terkait dengan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam meningkatkan sektor industri melalui pengembangan KEK Batam. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia dalam beberapa kesempatan juga berperan dalam melakukan pertemuan langsung dengan Singapura terkait rencana pengembangan KEK Batam. Melalui pertemuan tahunan bertema “*The 13th Co-chairs Meeting Working Group on Batam-Bintan-Karimun and Other Special Economic Zones in Indonesia (Working Group on BBK and Other SEZs)*,” pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membahas beberapa agenda penting terkait pengembangan KEK Batam dengan Singapura. Agenda tersebut meliputi perkembangan umum dari KEK Batam, pengembangan industri digital antara Singapura dengan Batam, serta peningkatan logistik Batam dan Singapura (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 2021).

Adanya pandemi Covid-19 sempat menghambat proses diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Singapura. Namun, pasca pandemi usai dan ekonomi mulai pulih kembali, BP Batam kembali memainkan perannya dalam

berdiplomasi dengan Singapura. Langkah awal yang diambil adalah melakukan pertemuan langsung dengan dua Menteri Singapura, yakni Menteri Tenaga Kerja serta Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Kunjungan yang dilakukan oleh Kepala BP Batam ini tepat dengan momentum pembukaan kembali perbatasan antara Indonesia dan Singapura yang dimulai pada 1 April 2022 (BP Batam 2022b). Dalam kunjungannya tersebut, BP Batam membahas beberapa pembahasan dengan Menteri Singapura, di mana di dalamnya meliputi pembahasan terkait proses pembangunan di Batam, yang juga meliputi terkait sektor industri secara khusus.

Diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam sektor industri melalui pengembangan KEK tidak lepas dari peran pemerintah Indonesia melalui BP Batam. Dalam upaya menggenjot investasi Singapura dalam sektor industri di KEK Batam, BP Batam mengadakan diskusi yang mengundang *Singapore Economic Development Board* (EDB) dan pengusaha-pengusaha Singapura pada 5 Juli 2023. Dalam forum diskusi tersebut, BP Batam memberikan penjelasan mendalam terkait data potensi investasi serta aturan-aturan baru terkait perpajakan (Chadie 2023). Hal ini mencakup informasi yang relevan mengenai penanaman modal asing dan terkait visa bagi pengusaha Singapura yang berdomisili di Batam. Diskusi ini sendiri dikemas dalam nuansa yang santai yang kemudian diwujudkan dalam bentuk acara “*Coffee Morning*.” Diskusi ini merupakan langkah konkret dari BP Batam untuk menginformasikan lebih mendalam kepada para pengusaha Singapura terkait peluang dan keuntungan yang dapat diperoleh dengan berinvestasi di KEK Batam (Aditia 2023).

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa hubungan prinsipal-agen utamanya ditunjukkan oleh hubungan pemerintah dengan BP Batam. Pemerintah

Indonesia sebagai prinsipal berperan dalam mengambil keputusan, seperti melakukan diskusi awal dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan KEK Batam. Di sisi lainnya, BP Batam berperan sebagai agen yang mendominasi pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam meningkatkan sektor industri melalui pengembangan KEK.

3.5 Faktor Ideasional

Bagian ini merupakan aplikasi dari variabel faktor ideasional. Dalam bukunya, Bayne dan Woolcock menjelaskan bahwa terdapat ruang terhadap faktor ideasional dalam diplomasi ekonomi. Faktor ideasional ini dapat terkait dengan pandangan dari para negosiator, ataupun terkait dengan adanya peran persuasi dalam diplomasi ekonomi (Bayne dan Woolcock 2017). Dalam konteks diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura, penjelasan faktor ideasional meliputi pandangan pemerintah Indonesia terhadap perdagangan dan investasi, serta persuasi yang dilakukan Indonesia terhadap Singapura.

Terkait dengan variabel faktor ideasional, pandangan konstruktivis menyatakan bahwa preferensi tidak bersifat konstan, melainkan dapat berubah dan bersifat *socially-determined*. Preferensi Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo terhadap perdagangan bebas dapat dikatakan berubah-ubah. Misalnya, dalam beberapa kesempatan pemerintah Indonesia memandang perdagangan bebas sebagai ancaman terhadap ekonomi dalam negeri karena perusahaan dalam negeri dinilai belum dapat bersaing dengan kuat (Zain 2022). Namun, dalam konteks diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura terkait pengembangan KEK,

pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo cenderung mendorong terciptanya pengembangan KEK dengan kerja sama Singapura.

Dalam pandangan konstruktivis, kecenderungan dorongan pemerintah Indonesia untuk melakukan pengembangan KEK dan berdiplomasi dengan Singapura tidak hanya untuk keuntungan relatif semata. Meskipun faktor-faktor ekonomi seperti investasi, perdagangan, dan infrastruktur memainkan peran utama, namun faktor ideasional juga memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan dinamika dan hasil dari diplomasi ekonomi antara kedua negara. Dalam beberapa kesempatan, Indonesia menyatakan keinginannya untuk menjadikan Batam lebih kompetitif, khususnya jika dibandingkan dengan Singapura yang secara strategis berdekatan dengan Batam (Lubis 2023). Hal ini berkaitan dengan aspek identitas nasional yang dimiliki oleh Indonesia, di mana pengembangan KEK Batam menegaskan terkait kemampuan untuk bersaing dalam skala internasional.

Dalam menghadapi kepentingan Indonesia yang lebih besar untuk mengembangkan Batam, diplomasi ekonomi dengan Singapura menjadi penting. Singapura memiliki posisi strategis sebagai pusat keuangan dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara (S. Anwar dan Yuangga 2019). Hal itu membuat hubungan ekonomi antara kedua negara memiliki dampak langsung pada keberhasilan KEK Batam. Dalam hal ini, faktor ideational seperti persepsi, kepentingan bersama, dan pembentukan opini publik di kedua negara menjadi penting dalam membentuk kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan.

Oleh karena faktor ideasional masih dapat berperan dalam diplomasi ekonomi, maka terkadang persuasi masih dibutuhkan. Dalam konteks diplomasi ekonomi Indonesia dengan Singapura dalam meningkatkan industri di Batam

melalui pengembangan KEK, persuasi dapat terlihat dari penekanan pada kepentingan bersama yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Pihak Indonesia dari BP Batam seringkali menekankan pada keuntungan yang akan didapatkan oleh Singapura dari pengembangan KEK Batam, yaitu adanya keuntungan kemudahan berinvestasi. Persuasi lainnya juga terlihat dari upaya BP Batam dalam membuka kantor perwakilan di Singapura yang akan membuat Singapura semakin tertarik untuk berinvestasi di Batam (BP Batam 2021b).

Jaminan kemudahan investasi yang diberikan oleh BP Batam dapat dikatakan berhasil dalam mendongkrak nilai penanaman modal asing di Batam. Pada tahun 2023, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Aristuty Sirait menyatakan bahwa sektor paling dominan dari penanaman modal asing di Batam pada tahun 2022 adalah sektor industri, khususnya industri mesin atau elektronik, biomedis, dan peralatan listrik (BPK RI Perwakilan Provinsi Riau 2023).

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Ketimpangan merupakan ketidakseimbangan yang sering kali menjadi masalah serius di dalam ASEAN. Untuk menanggulangi permasalahan ini, ASEAN telah melaksanakan beberapa langkah penting, salah satunya adalah dengan meningkatkan kerja sama intra-ASEAN, atau kerja sama antar negara anggota. Dengan menggalang kerja sama intra-ASEAN, ASEAN berupaya untuk memperkuat solidaritas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Selain itu, ASEAN juga mengedepankan kerja sama eksternal dengan negara-negara di luar kawasan untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam mengatasi ketimpangan.

Salah satu contoh dari kerja sama intra-ASEAN adalah yang dilakukan Indonesia dengan Singapura. Hubungan keduanya telah terbangun sejak tahun 1973 dan terus meningkat seiring berjalannya waktu dalam berbagai bidang. Singapura juga merupakan mitra kunci bagi Indonesia dalam perdagangan dan investasi, terutama karena Singapura secara konsisten menjadi investor terbesar di Batam, Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Indonesia menjadikan Singapura sebagai target diplomasi ekonominya melalui adanya pengembangan KEK di Batam.

Dengan menggunakan konsep diplomasi ekonomi baru dari Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock, penelitian ini menemukan bahwa dalam diplomasinya, Indonesia mempertimbangkan lima variabel yang sesuai dengan konsep yang ada.

Variabel tersebut antara lain adalah variabel *relative economic power, international regimes, interests, institution and domestic decision-making*, serta *ideational factors*. Dalam relevansinya dengan penelitian ini, Indonesia sebagai pelaku diplomasi ekonomi berkeinginan untuk meningkatkan sektor industri di Batam melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dengan menjadikan Singapura sebagai target dari diplomasinya.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Konsep Diplomasi Ekonomi

Variabel	Hasil Analisis
Kekuatan ekonomi relatif	<ul style="list-style-type: none"> • Perekonomian Singapura dan iklim investasi yang baik membuat Indonesia menjadikan Singapura sebagai target diplomasi ekonomi • Signifikansi kerja sama dengan Singapura dalam membantu meningkatkan sektor industri di Batam
Rezim internasional	<ul style="list-style-type: none"> • AFTA dan MoU 2006 sebagai landasan diplomasi Indonesia dengan Singapura • AFTA mendorong adanya investasi asing yang menghasilkan MoU 2006 dengan mengikuti prinsip GATT
Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan yang datang dari berbagai pihak, seperti dari pemerintah dan kelompok pengusaha • Pemerintah Indonesia berupaya menjembatani kepentingan dengan hasil mengejar peningkatan sektor industri di Batam
Institusi dan pengambilan keputusan dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan prinsipal-agen ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dan BP Batam • Pemerintah Indonesia menetapkan keputusan dan BP Batam menjadi pelaksana dalam diplomasi ekonomi dengan Singapura
Faktor ideasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pandangan Indonesia yang berubah-ubah terhadap perdagangan bebas, namun mendukung adanya pengembangan KEK • Diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura berkaitan dengan identitas nasional dan kemampuan untuk bersaing secara internasional

Pada variabel kekuatan ekonomi relatif, pengaplikasiannya adalah kekuatan ekonomi relatif Singapura yang membuat Indonesia tertarik menjadikannya sebagai target diplomasi ekonomi. Dalam konteks ini, Singapura, sebagai pusat keuangan utama di Asia Pasifik, memiliki perekonomian maju didorong oleh sektor-sektor utama seperti elektronik, transportasi, manufaktur biomedis, dan jasa. Singapura mendukung perdagangan multilateral melalui WTO dan investasi keluar melalui lembaga seperti Enterprise Singapore. Oleh karena kekuatan relatif yang dimiliki Singapura, Indonesia menyadari pentingnya kerja sama dengan Singapura untuk stabilitas ekonomi regional, dan kemudian mengambil langkah-langkah diplomasi dan negosiasi, termasuk usulan pembentukan KEK sebagai strategi untuk meningkatkan kondisi ekonomi domestik, terutama dalam sektor industri.

Pada variabel rezim internasional, penerapannya adalah rezim yang mengatur hubungan dan diplomasi Indonesia dengan Singapura, yaitu AFTA dan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus pada tahun 2006. Adanya AFTA mendorong negara-negara ASEAN untuk melakukan perdagangan dan investasi. AFTA kemudian dijadikan landasan dalam landasan kerja sama selanjutnya, yaitu MoU tentang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). MoU Batam didasarkan pada prinsip-prinsip GATT dan bertujuan untuk mempermudah aktivitas ekonomi di berbagai sektor. AFTA dan MoU 2006 menjadi rezim yang memfasilitasi hubungan dan kelanjutan dari hubungan tersebut yang berbentuk diplomasi ekonomi Indonesia dengan Singapura.

Pada variabel kepentingan, penerapannya adalah kepentingan Indonesia untuk meningkatkan sektor industri di Batam. Isu yang menjadi fokus adalah penurunan ekonomi yang disertai penurunan pada sektor industri di Batam. Untuk

mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia berupaya menjadikan Singapura sebagai tujuan diplomasi ekonomi untuk memulihkan ekonomi dan mengembangkan sektor industri di Batam melalui pengembangan KEK. Langkah ini mencerminkan usaha pemerintah dalam mempertimbangkan berbagai kepentingan domestik, seperti dari kelompok pengusaha, dan berupaya untuk memaksimalkan utilitas ekonomi, terutama dalam menjaga kerjasama dengan investor terbesar Batam, yaitu Singapura.

Pada variabel institusi dan pengambilan keputusan dalam negeri, penerapannya adalah hubungan prinsipal-agen dari pemerintah Indonesia dengan lembaga BP Batam. Pemerintah Indonesia sebagai prinsipal melakukan pengambilan keputusan, sedangkan BP Batam mendominasi peran dalam menjalankan diplomasi dengan Singapura dalam meningkatkan sektor industri di Batam. Hubungan prinsipal-agen ini dapat terlihat dari berbagai keputusan pemerintah Indonesia melalui adanya Peraturan Pemerintah, serta dari sisi agen terlihat dari BP Batam sebagai pelaksana dengan upaya diplomasi dengan Singapura untuk membuat Singapura dapat secara masif berinvestasi pada sektor industri di Batam.

Pada variabel faktor ideasional, penerapannya adalah faktor-faktor yang tidak termasuk faktor material, di mana konsepnya sendiri didasarkan pada pandangan konstruktivis. Diplomasi ini tidak hanya bertujuan untuk keuntungan ekonomi semata, namun juga terkait dengan identitas nasional Indonesia dan kemampuan untuk bersaing secara internasional. Hubungan ekonomi Indonesia-Singapura menjadi krusial dalam keberhasilan KEK Batam, dan faktor ideasional seperti persepsi, kepentingan bersama, dan opini publik memainkan peran penting

dalam membentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Persuasi juga menjadi alat penting dalam diplomasi ini, terlihat dari penekanan pada keuntungan bersama dan upaya BP Batam untuk membuka kantor perwakilan di Singapura. Jaminan kemudahan investasi yang ditawarkan berhasil meningkatkan penanaman modal asing di Batam, terutama dalam sektor industri.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam terkait kerja sama Indonesia dan Singapura dalam kerangka kerja sama intra-ASEAN, melainkan secara khusus memberikan pemahaman terkait upaya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura melalui pengembangan KEK di Kota Batam. Penelitian ini kemudian memberikan kontribusi bagi kajian ekonomi dan kawasan perdagangan bebas. Dengan menggunakan konsep diplomasi ekonomi baru, penelitian ini memberikan gambaran bahwa diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dilakukan dengan mempertimbangkan variabel kekuatan ekonomi relatif, rezim internasional, kepentingan, institusi dan pengambilan keputusan dalam negeri, serta faktor ideasional.

4.2. Rekomendasi

Penelitian ini membahas diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam sektor industri di Batam melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Penelitian ini menggunakan konsep dari Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock terkait diplomasi ekonomi baru yang berkaitan dengan lima variabel utama. Namun, penelitian ini masih terdapat kekurangan pada bagian data, khususnya faktor ideasional. Data yang disampaikan dalam penelitian ini hanya berupa data

sekunder. Sedangkan untuk menelusuri lebih dalam terkait faktor ideasional, data primer, yang didapat dari wawancara dengan instansi terkait, menjadi salah satu alat untuk melengkapi penelitian. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah dengan melakukan penelitian dengan menggunakan wawancara sehingga data primer yang didapatkan dapat membantu kelengkapan dalam penelitian terkait diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam sektor industri melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Selain itu, rekomendasi lain yang dapat disampaikan adalah terkait dengan keberlanjutan dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus itu sendiri. Hal ini didasarkan oleh cakupan penelitian ini yang terbatas pada tahun 2023. Sedangkan terdapat inisiasi destinasi-destinasi Kawasan Ekonomi Khusus baru di Batam yang akan berkontribusi terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus secara umum dan berkontribusi pada sektor tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Rangga Putra. 2023. "Assessing the Impacts of Paradiplomacy on Batam-Singapore Cooperation: A Case Study in Tourism, Economic Growth, and Infrastructure Development." *Journal of Paradiplomacy and City Networks* 2 (1): 12–20. <https://doi.org/10.18196/jpcn.v2i1.27>.
- Achmad, dan Fadillah Afrivo Nasir. 2022. "Kerjasama pemerintah Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan wilayah kawasan ekonomi khusus era Joko Widodo-Jusuf Kalla (Periode 2015-2019)." *Journal of Government Science (GovSci)* 3 (2): 119–31. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.36>.
- Aditia. 2023. "BP Batam Gelar Coffee Morning dengan Pengusaha Singapura untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Batam." *Batam News*. 2023. <https://www.batamnews.co.id/berita-101295-bp-batam-gelar-coffee-morning-dengan-pengusaha-singapura-untuk-dorong-pertumbuhan-ekonomi-batam.html>.
- Akmaludin. 2016. "Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Penetapan Garis Batas Laut di Bagian Timur Selat Singapura." *Jurnal Online Mahasiswa FISIP* 3 (1): 1–15.
- Anugrahini, Dewi Nur. 2015. "Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam dalam Pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ)." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 3 (3): 559–70.
- Anwar, Jaitul, Yuanita FD Sidabutar, Raymond, dan Rini Lisbet Sitio. 2023. "Nongsa Development as A Special Economic Zone." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* 8 (2): 882–94.
- Anwar, Syamsul, dan Kharisma Danang Yuangga. 2019. "Pertumbuhan Ekonomi di Singapura Sejak Berdirinya Monetary Authority of Singapore." *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis* 5 (1): 45–57.
- Apriliyanti, Romayati. 2015. "Upaya Diplomasi Indonesia pada Peningkatan Investasi Asing di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus 'Diplomatic Tour 7-9 September 2012')." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP* 2 (1): 1–14.
- Aritenang, Adiwana F. 2009. "Comparative Study on Free Trade Zone: Development Through Spatial Economy Concentration." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 20 (2): 95–108.
- Aritenang, Adiwana Fahlan. 2020. "The Continuity of Batam Importance to the Development of BBK Region: A Regional Economic Perspective." Dalam *6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020)*. Atlantic Press.
- Arjuna, Desy. 2016. "Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam Realisasi Special Economic Zone (SEZ) di Batam, Bintan dan Karimun." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP* 3 (2): 1–11.
- Bani, Bobi. 2019. "Apindo Batam : Tidak Ada Masalah Perdagangan Bebas di Wilayah FTZ ." *Bisnis Sumatera*. 2019. <https://sumatra.bisnis.com/read/20190627/534/938602/apindo-batam-tidak-ada-masalah-perdagangan-bebas-di-wilayah-ftz>.
- . 2020. "BP Batam Perkenalkan Kepala Urusan Ekonomi Internasional untuk Singapura." *Sumatra*. 2020.

- <https://sumatra.bisnis.com/read/20200916/534/1292589/bp-batam-perkenalkan-kepala-urusan-ekonomi-internasional-untuk-singapura>.
- Bareksa. 2016. "Sepanjang Triwulan III-2016, Singapura Paling Banyak Tanam Modal di Indonesia." Bareksa. 2016. <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2016-10-15/sepanjang-triwulan-iii-2016-singapura-paling-banyak-tanam-modal-di-indonesia>.
- Bayne, Nicholas, dan Stephen Woolcock. 2017. *The New Economic Diplomacy*. 4 ed. Routledge.
- BP Batam. 2021a. "Industri di Batam dan Berkenalan dengan Jenis-jenisnya." Badan Pengusahaan Batam. 2021. <https://bpbatam.go.id/industri-di-batam-dan-berkenalan-dengan-jenis-jenisnya/>.
- . 2021b. "Investasi Singapura di Batam Sangatlah Menggembirakan." Badan Pengusahaan Batam. 2021. <https://bpbatam.go.id/en/investasi-singapura-di-batam/>.
- . 2021c. "KEK Batam Aero Technic Terobosan di Industri Penerbangan." Badan Pengusahaan Batam. 2021. <https://bpbatam.go.id/en/kek-batam-aero-technic/>.
- . 2022a. "Data Center KEK Nongsa Diperkirakan Mulai Beroperasi Tahun 2024." Badan Pengusahaan Batam. 2022. <https://perwakilan.bpbatam.go.id/data-center-kek-nongsa-diperkirakan-mulai-beroperasi-tahun-2024/>.
- . 2022b. "Kepala BP Batam Bertemu 2 Menteri Singapura." Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 2022. <https://perwakilan.bpbatam.go.id/kepala-bp-batam-bertemu-2-menteri-singapura/>.
- . 2023a. "KEK Nongsa Mendunia." Badan Pengusahaan Batam. 2023. <https://bpbatam.go.id/kek-nongsa-mendunia/>.
- . 2023b. "Pengelola KEK Apresiasi Upaya BP Batam Tingkatkan Infrastruktur Pendukung Kemajuan Daerah." Badan Pengusahaan Batam. 2023. <https://bpbatam.go.id/pengelola-kek-apresiasi-upaya-bp-batam-tingkatkan-infrastruktur-pendukung-kemajuan-daerah/>.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. 2023. "Kepala BP Batam Jamin Kemudahan Investasi, Nilai PMA Tahun 2022 Naik 48,5 Persen." BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. 2023. <https://kepri.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Catatan-Berita-Kepala-BP-Batam-Jamin-kemudahan-Investasi-nilai-PMA-Tahun-2022.pdf>.
- Budiman, Dicky. 2019. "Status Free Trade Zone Kota Batam Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan." *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 2 (2): 16–22.
- Budiyantini, Yanti, dan Tyas Amalia. 2021. "Penilaian Kinerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Pembangunan Kota Batam." *RekaLoka: Jurnal Online Institut Teknologi Nasional* 1 (1): 44–55.
- Chadie. 2023. "Dorong Pertumbuhan Ekonomi Batam, BP Batam Gelar Coffee Morning Bersama Pengusaha Singapura." Media Indonesia. 2023. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/601093/dorong-pertumbuhan-ekonomi-batam-bp-batam-gelar-coffee-morning-bersama-pengusaha-singapura>.
- CSIS. 2015. *Kawasan Ekonomi Khusus*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

- Dalla, Alexander Yanuard, dan Friska Natlia Hutabarat. 2018. "Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam." *Matra Pembaruan* 2 (2): 139–48. <https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018.139-148>.
- Damuri, Yose Rizal, David Christian, dan Atje Raymond. 2015. *Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis di Indonesia: Tinjauan atas Peluang dan Permasalahan*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Databoks. 2017. "Inilah 10 Negara dengan Investasi Terbesar ke Indonesia 2017." Databoks. 2017. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/01/inilah-10-negara-dengan-investasi-terbesar-ke-indonesia-2017>.
- Dewan Nasional KEK. 2024. "Presiden Groundbreaking Pabrik Bahan Baku Baterai Terbesar se-Asia Tenggara di KEK Gresik." Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. 2024. <https://kek.go.id/id/media/press/presiden-groundbreaking-pabrik-bahan-baku-baterai-terbesar-se-asia-tenggara-di-kek-gresik>.
- DPR RI. 2016. "Transformasi Batam Menjadi KEK Demi Memperbaiki Iklim Investasi." *Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik* 8 (6): 13–16.
- Fatimah, Zahara, Bangun Paruntung Simamora, dan Frangky Silitonga. 2022. "Pemberlakuan FTZ di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam dalam Peningkatan Pariwisata." *Jurnal Mekar* 1 (1): 7–13.
- Fauziah, Syifa, dan Yolanda Febiola Aritonang. 2023. "Analisis Fasilitas Penunjang Sektor Parawisata di Bandara Internasional Hang Nadim Batam." *Jurnal Flight Attendant Kedirgantaraan* 5 (1): 57–68.
- Fernandez, Manuel, Mariam Mohamed Almaazmi, dan Robinson Joseph. 2020. "Foreign Direct Investment in Indonesia: An Analysis from Investors Perspective." *International Journal of Economics and Financial Issues* 10 (5): 102–12. <https://doi.org/10.32479/ijefi.10330>.
- Geraldo, Varelza, dan Dairatul Maarif. 2022. "Kerjasama Indonesia-Singapura di Bidang Ekonomi Digital melalui Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park di Batam 2018-2020." *Astuti, Wiwiek Rukmi Dwi* 2 (2): 128–42.
- Harpiandi, Nur Muhammad Bagus. 2019. "Kerjasama Indonesia-Singapura Dalam Bidang Ekonomi Digital 2017." Universitas Komputer Indonesia.
- Hirschmann, Raudhah. 2023. "Manufacturing sector in Singapore - statistics & facts." Statista. 2023. <https://www.statista.com/topics/9319/manufacturing-sector-in-singapore/#topicOverview>.
- HMS. 2020. "Pemodal Singapura Akan Berinvestasi di Batam 16 September 2020." HMS Times. 2020. <https://hmstimes.com/2020/pemodal-singapura-akan-berinvestasi-di-batam/>.
- Hutchinson, Francis E., dan Leo van Grunsven. 2018. "Industry dynamics in Growth Triangles: the E&E industry in SIJORI 25 years on." *Asian Pacific Economic Literature* 32 (2): 42–63. <https://doi.org/10.1111/apel.12235>.
- Ishikawa, Koichi. 2021. "The ASEAN Economic Community and ASEAN economic integration." *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10 (1): 24–41. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1891702>.
- Istiqomah, Zainamantasya Ghaida, dan Eko Budi Santoso. 2022. "Penentuan Kinerja Pelayanan Infrastruktur di Kawasan Industri dalam Rangka

- Mendukung Kota Batam sebagai Kawasan Free Trade Zone.” *Jurnal Teknik ITS* 11 (3): 157–62.
- ITA. 2024. “Singapore - Trade Agreements.” International Trade Administration. 2024.
- Kam, Wong Poh, dan Ng Kwan Kee. 2009. “Batam, Bintan and Karimun – Past History and Current Development Towards Being A SEZ.”
- Kantor Imigrasi Batam. 2022. “Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.” Kantor Imigrasi Batam. 2022.
<https://doi.org/https://kanibatam.kemenkumham.go.id/category/direktur-jendral-imigrasi/pemberlakuan-peraturan-pemerintah-nomor-41-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-kawasan-perdagangan-bebas-dan-pelabuhan-bebas>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2016a. “Batam, Dari Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2016. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1324/batam-dari-kawasan-perdagangan-bebas-dan-pelabuhan-bebas-menjadi-kawasan-ekonomi-khusus>.
- . 2016b. “Batam Harus Kembali Berdaya Saing.”
- . 2016c. “Memasuki 50 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama.” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2016.
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2300/memasuki-50-tahun-hubungan->
- . 2021. “Akselerasi Pembangunan Ekonomi Melalui Kerja Sama Strategis Antar Negara.” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2021. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2963/akselerasi-pembangunan-ekonomi-melalui-kerja-sama-strategis-antar-negara>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2022. “Gubernur Kepulauan Riau Tandatangani Kerja Sama Energi Baru dan Terbarukan di Singapura.” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2022.
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/3605/berita/gubernur-kepulauan-riau-tandatangani-kerja-sama-energi-baru-dan-terbarukan-di-singapura>.
- Kementerian Luar Negeri RI. 2023. “Singapura dan Indonesia Kokohkan Hubungan Bilateral di Resepsi Diplomatik HUT RI ke-78.” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2023.
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/5134/berita/singapura-dan-indonesia-kokohkan-hubungan-bilateral-di-resepsi-diplomatik-hut-ri-ke-78#:~:text=Indonesia%20juga%20merupakan%20mitra%20dagang,on%20year%20dibandingkan%20tahun%202021>.
- Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Singapura. 2019. “Economic Survey of Singapore 2018.”
- Kementerian Perindustrian RI. 2021. “Kemenperin Dukung Akselerasi KEK Batam Aero Technic dan Nongsa Digital Park.” Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2021.
<https://pressrelease.kontan.co.id/release/kemenperin-dukung-akselerasi-kek-batam-aero-technic-dan-nongsa-digital-park?page=all>.

- Kuroda, Haruhiko. 2013. "Asia's Challenges." Organization for Economic Cooperation and Development . 2013. <https://www.oecd.org/forum/asia-challenges.htm>.
- Lavinda. 2018. "Pengusaha Tolak Batam jadi Kawasan Ekonomi Khusus." CNN Indonesia. 2018. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180604085527-92-303165/pengusaha-tolak-batam-jadi-kawasan-ekonomi-khusus>.
- Lubis, Rifki Setiawan. 2023. "Singapura Tangkap Peluang Pengembangan SEZ di Batam." *Bisnis Sumatera*. 2023. <https://sumatra.bisnis.com/read/20230507/534/1653439/singapura-tangkap-peluang-pengembangan-sez-di-batam>.
- Marzuki, Keoni. 2017. "Indonesia-Singapore Relations: The Next 50 Years." *RSIS Commentaries* 154. Singapore.
- Muhammad, Mahdi. 2023. "ASEAN Terengah-engah Wujudkan Pusat Pertumbuhan." *Kompas*. 2023. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/07/25/asean-terengah-engah-wujudkan-pusat-pertumbuhan>.
- Muzwardi, Ady. 2016. "Analisis Pengelolaan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB) Batam." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9 (1): 31–38.
- Nadalutti, Elisabetta. 2015. "The rise of trans-border regions in Southeast Asia: behind the dynamics of informal and formal integration processes in the 'Indonesia–Malaysia–Singapore' growth triangle." *The Pacific Review* 28 (4): 607–30.
- Naim, Yuniati Jannatun. 2021. "Pilih-pilih FTZ atau KEK di Batam." *Antara*. 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2228454/pilih-pilih-ftz-atau-kek-di-batam>.
- Ningsih, Desrini. 2018. "Analisis Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Batam." *Jurnal Ilmiah Manajemen UPB* 6 (1): 12–18.
- Ortax. 2009. "Pajak di Kawasan Free Trade Zone Dikurangi." *Ortax*. 2009. <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/4844>.
- Pahlawan, Indra, Afrizal, Cifebrima Suyastri, dan Rendi Prayuda. 2014. "Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam Penetapan Kawasan Special Economic Zone di Wilayah Batam Bintan Karimun (BBK)." Dalam *Seminar Nasional Politik, Birokrasi, & Perubahan Sosial Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa Tahun 2013*. Universitas Riau.
- Pakpahan, Hilda Delvia Febriyanti. 2011. "Dinamika Hubungan Bilateral Investasi Indonesia Singapura: Kasus Free Trade Zone di Batam 2005-2009." Universitas Pelita Harapan.
- Permatasari, Yunita. 2020. "Building Indonesia through ASEAN economic community." *Journal of ASEAN Studies* 8 (1): 81–93. <https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6040>.
- Pramudyani, Yashinta Difa. 2020. "Kadin dukung pelaksanaan diplomasi ekonomi yang digalakkan Kemlu." *Kompas*. 2020. <https://www.antaraneews.com/berita/1241591/kadin-dukung-pelaksanaan-diplomasi-ekonomi-yang-digalakkan-kemlu>.
- Purba, Daris, dan Asron Saputra. 2018. "Faktor Dominan Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Batam." Dalam *Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi*, 37–42. Batam: Universitas Putera Batam.

- Putra, Irwan Sapta, dan Yunawati Karlina. 2022. "Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura Ditinjau dari Hukum Pidana." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2): 321–31.
<https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.44>.
- Putra, Rinaldo Dwi. 2021. "Investasi Nongsa Digital Park (NDP) sebagai Kerjasama Sektor Digital antara Singapura dan Indonesia di Batam." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 4 (1): 83–96.
<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/191/189>.
- Putri, Irsya Tursina. 2022. "Analisis Kerjasama AFTA dan Indonesia: Peluang dan Tantangan 2015-2020." *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Sosial (Publicio)* 4 (1): 11–24.
- Rachmawati, Tety. 2017. "Strategi Diplomasi Asean Terhadap Jepang Untuk Mengurangi Kesenjangan Ekonomi Di Asean." *Jurnal PIR : Power in International Relations* 1 (2): 87–107.
- Ramadhan, Dery Rizky. 2022. "Kawasan Ekonomi Khusus ASEAN: Komparasi Pengembangan Indonesia dan Vietnam." Skripsi, Universitas Sriwijaya.
- Rejeki, Kurniawan. 2014. "Analisis Yuridis Pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai Strategi Menarik Investor Asing." Skripsi, Universitas Jember.
- Salisty, A.D. Agung. 2021. "Keutamaan World Trade Organization atas Regional Trade Agreements dalam Perdagangan Internasional." *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum* 37 (2): 215–34.
- Sarmiento, Prime, dan Leonardus Jegho. 2023. "ASEAN to benefit as Indonesia, Singapore take bilateral ties to new phase." *China Daily*. 2023.
<https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/21/WS64198b18a31057c47ebb5b40.html>.
- Sibuea, Naomi Fhaskalina. 2019. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia." *Lex Et Societatis* 7 (8): 73–83.
http://digilid.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_Artikel.
- Syuzairi, M., Yustika Anggitarius, Abdul Djalal, dan Bunga Paramita. 2022. "Peran Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam Menarik Investasi Asing di Kota Batam ." *Jurnal Bahtera Inovasi* 6 (1): 86–96.
- The Jakarta Post. 2009. "Singapore opens consulate in Batam." *The Jakarta Post*. 2009. <https://www.thejakartapost.com/news/2009/04/28/singapore-opens-consulate-batam.html>.
- Ulfa, Nadlirotul, Desiana Rizka Fimmastuti, dan Anisa Nur Nia Rahmah. 2018. "Hard and Soft Border Paradigm for Border Governance in Indonesia: A General Review." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 3 (1): 81–103.
- U.S. Department of State. 2023. "2023 Investment Climate Statements: Singapore." U.S. Department of State. 2023.
<https://www.state.gov/reports/2023-investment-climate-statements/singapore/>.
- Vingalianti, Augusty. 2019. "Diplomasi Indonesia melalui Rumah Budaya Indonesia di Singapura Periode 2013-2015." Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Wanandi, Jusuf. 2017. "Insight: Fifty years of Indonesia-Singapore relations." *The Jakarta Post*. 2017.

- <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/09/07/insight-fifty-years-of-indonesia-singapore-relations.html>.
- Waruwu, Wilda Mukhalladun, Lubna Salsabila, dan Aqil Teguh Fathani. 2023. "Optimalisasi E-Government pada Kawasan Free Trade Zone di Kota Batam." *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasipol)* 3 (1): 49–57. <https://doi.org/10.35912/jasipol.v3i1.1874>.
- Widhyharto, Derajad S. 2012. "Kebijakan Transformatif Kerjasama dan Share Value." *Jurnal Kebijakan Publik* 3 (2): 59–141.
- Wiryan, Bangkit A. 2018. "Addressing Innovation Competitiveness of Batam Free Trade Zone: What Went Wrong?" Dalam *International Conference on Social and Political Issues (the 1st ICSPI, 2016) "Knowledge and Social Transformation,"* 104–14. KnE Social Sciences. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.2907>.
- WTO. 2021. "Trade Policy Review Singapore." World Trade Organization. 2021.
- Yeo, Lay Hwee. 2019. "Singapore's Policy in the Asia-Pacific: Asean and Open Regionalism." *Baltic Journal of European Studies* 9 (2): 21–39.
- Zaenuddin, Muhammad, Wahyudi Kumorotomo, Samsubar Saleh, dan Agus Heruanto Hadna. 2017. "Praktek Otonomi Daerah di Batam : Dinamika dan Permasalahan Penerapan Kebijakan Free Trade Zone (FTZ)." Dalam *Seminar Nasional Cendekiawan*, 125–39.
- Zain, Winarno. 2022. "The cost and benefit of Jokowi's free trade policy." The Jakarta Post. 2022. <https://www.thejakartapost.com/paper/2022/02/10/the-cost-and-benefit-of-jokowis-free-trade-policy.html>.